



2025

LAPORAN TAHUNAN

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

📍 Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Gambir, Jakarta 10110

🔍 <https://baketrans.kemenuh.go.id/>

✉ baketrans@kemenuh.go.id

☎ (021) 3483-3060



PROFIL PIMPINAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

A. KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Irjen Pol Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.

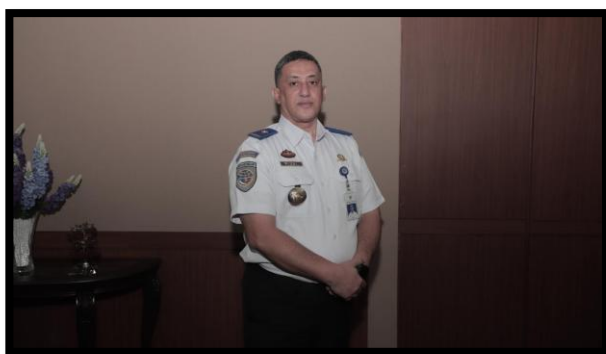


Lahir di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1973. Memulai karir sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok (2019), Direktur Perkapalan dan Kepelautan (2020), Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar (2021), Kepala Kantor Kesyahbandaran Kelas 1 Banten (2022), Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan (2024) dan kemudian bergabung dengan Badan Kebijakan Transportasi sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi sejak 09 Mei 2025 sampai dengan sekarang. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yaitu Akademi

Ilmu Pelayaran (1995), Sekolah Perwira (2004), Sekolah Lanjutan Perwira (2004), Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (2007), Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (2013), Pelatihan Kepemimpinan Tinggi (2020), dan menyelesaikan Master Program pada tahun 2021.

B. SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Rizal, ST., MA.



Lahir di di Malang, Jawa Timur pada tanggal 01 Juni 1969. Memulai karir menjadi Kasubsi Pesawat Udara Dan Fasilitas Pengujian Seksi Operasi Penerbangan (2007–2011), Kasi Pengujian Dan Peneraan, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (2011–2013), Kepala Bidang

Teknik Dan Operasi Pesawat Udara (2013–2017), Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I, Fatmawati Soekarno (2017–2018), Kepala Bidang Keselamatan Dan Pengujian (2018–2019), Kepala Bidang Teknik Dan Operasi Pesawat Udara (2019–2021), Kepala Bidang Pelayanan Dan Pengoperasian Bandar Udara (2021), Kepala Bidang Teknik Dan Operasi Pesawat Udara (2021), Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (2021–2023), Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah Iii Juanda – Surabaya (2023–2025), dan kemudian bergabung dengan Badan Kebijakan Transportasi sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi sejak 09 Mei 2025 sampai dengan sekarang.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan Strata 1/ S1 Teknologi Industri – Universitas Mercu Buana (1999) dan menyelesaikan Strata 2/ S2 Magister Ilmu Administrasi – STIAM I (2015).

C. KEPALA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI

Suranto, A.TD., M.T.



Lahir di Semarang pada tanggal 25 April 1968. Memulai karir menjadi Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (25-07-2016), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat (26-06-2019 s.d 10-06-2022),

Kepala Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan (10-06-2022 s.d 20-09-2022), Direktur Sarana Perkeretaapian (04-04-2023 s.d 20-06-2024), Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi (20-06-2024 s.d Sekarang).

Beliau memiliki latar belakang pendidikan Diploma IV/ DIV Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi Tahun 1994 dan Strata 2/ S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2002.

D. KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA

Capt. Novyanto Widadi, S.A.P., M.M., M.Tr.T., CGRE.



Lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1968. Memulai karir menjadi Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (02-11-2016 s.d 12-12-2019) kemudian bergabung dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan

Transportasi Udara (20-12-2019 s.d 2022) dan sampai saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transportasi.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan D4 Akademi Angkatan Udara Jakarta (1990), Strata 1/ S1 Universitas Terbuka Malang (1999), Strata 2/ S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – ISM Tangerang (2017) dan Strata 2/ S2 PTDI – STTD (2024).

E. KEPALA PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Dr. Muhammad Arief Affandi, S.E., Ak., M.Acc., CA., CPA., CGRE.



Lahir di Palembang pada tanggal 05 Agustus 1984. Memulai karir menjadi Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2011), Kepala Sub Bagian Verifikasi Dan Akuntansi, Bagian

Keuangan Sekretariat Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2012), Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Bina Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2017), Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2022), Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (2023–2024), Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (2024–2025) dan bergabung dengan Badan Kebijakan Transportasi sebagai Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas Dan Angkutan Transportasi (2025).

Beliau memiliki latar belakang pendidikan Strata 1/ S1 Profesi Akuntansi – Universitas Gadjah Mada (2007) dan Strata 2/ S2 Magister Akuntansi – Universitas Gadjah Mada (2008).

F. KEPALA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

Ir. Bernadette Endah Sekar Mayashanti, M.T.



Lahir di di Pekalongan pada tanggal 03 Agustus 1969. Memulai karir menjadi Direktur Keselamatan Perkeretaapian (2024–2025), dan bergabung dengan Badan Kebijakan Transportasi sebagai Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi (2025 – sekarang).

Beliau memiliki latar belakang pendidikan Strata 1/ S1 Sarjana Teknik Planologi – ITB (1993) dan Strata 2/ S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota – ITB (1996).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025, Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Badan Kebijakan Transportasi mempunyai 5 (lima) unit satuan kerja yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi, serta Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per 05 Januari 2026 adalah sebanyak 341 pegawai, terdiri dari 261 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 66 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 4 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan 10 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, Badan Kebijakan Transportasi hadir sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif dan *responsive*. Program dan Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2025 memiliki target sebanyak 43 (empat puluh tiga) Rekomendasi Kebijakan dan terealisasi sebanyak 36 Rekomendasi Kebijakan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor : KP-BKT 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor: KP-BKT 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025-2029 pada tanggal 1 Juli 2025, Badan Kebijakan Transportasi memiliki 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yang diwujudkan melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi dasar analisa capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025 telah mencapai target. Mengacu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), telah dilakukan evaluasi pencapaian target dan diperoleh rata – rata capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi sebesar 108,927% dengan rincian realisasi serta capaian indikator kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

- a. IKP 1 yaitu Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan memiliki realisasi sebesar 87,954%, sehingga bila dibandingkan dengan target PK sebesar 85% maka diperoleh capaian kinerja sebesar 103,476%;
- b. IKP 2 yaitu Indeks Koordinasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi memiliki realisasi sebesar 89,221%. Jika dibandingkan dengan target PK 80% maka diperoleh capaian kinerja sebesar 111,527%;

- c. IKP 3 yaitu Indeks Tata Kelola Badan Kebijakan Transportasi memiliki realisasi sebesar 92,777%. Jika dibandingkan dengan target PK 83% maka diperoleh capaian kinerja sebesar 111,779%.

Pagu anggaran awal Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 116.772.728.000,00 yang selanjutnya pada akhir tahun 2025 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.125.391.269.000,00 dengan pagu efektif sebesar Rp. 91.636.777.000,00. Realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi tahun 2025 sebesar Rp 90.370.825.415,00 sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 72,071%. Jika dibandingkan dengan pagu efektif sebesar diperoleh realisasi sebesar 98,619%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian realisasi anggaran tahun 2025 lebih rendah dari pada realiasi tahun 2024. Selama Tahun 2025 Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan 2 penghargaan yaitu Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Transportasi.

Sampai dengan bulan Desember 2025, sebanyak 9 (sembilan) pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi telah mengajukan permohonan tugas belajar. Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pemberian tugas belajar sampai dengan Semester II Tahun 2025, tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) pegawai Badan Kebijakan Transportasi sedang melaksanakan tugas belajar. Badan Kebijakan Transportasi telah menyelenggarakan sebanyak 1 (satu) kegiatan pelatihan dan berpartisipasi aktif dalam 5 (lima) pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh eksternal Badan Kebijakan Transportasi. Kegiatan tugas belajar dan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian para pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Kegiatan Strategis Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kebijakan Transportasi menerima kunjungan Bupati Kabupaten Ketapang beserta Kadishub Ketapang;
- b. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi Bupati Merauke;
- c. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. Workshop Perpustakaan Khusus dengan tema “Strategi Penulisan Prompt untuk Layanan Perpustakaan”;
- e. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi dari Bupati Pesisir Selatan;
- f. Workshop Awareness Akreditasi Perpustakaan Khusus dan Perguruan Tinggi;
- g. Penandatanganan Keputusan Bersama Badan Kebijakan Transportasi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) terkait tentang pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Isu Strategis dan Analisis Kebijakan Sektor Transportasi;

- h. Agenda Mapping Isu Strategis Sektor Transportasi 2025 dengan tema “Penguatan Sistem Perencanaan, Pembiayaan dan Investasi, Serta Kelembagaan Menuju Transportasi Indonesia Emas”;
- i. Konsultasi Publik Reviu Naskah Akademik dan RUU Sistranas;
- j. Webinar Kebijakan Ekosistem Pengoperasian Seaplane sebagai Alternatif Moda untuk Daerah Laut dan Sungai di Indonesia;
- k. Advokasi Analisis Kebijakan Transportasi;
- l. Transport Dialogue dan #TransporTalk: ALOHA;
- m. Agenda Mapping dengan tema “Konektivitas Sebagai Penggerak Utama Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Logistik”;
- n. Agenda Mapping dengan tema "Kebijakan Angkutan Umum yang Inklusif untuk Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan dan Berkeadilan”;
- o. Agenda Mapping dengan tema Penguatan Resiliensi, Keselamatan dan Keamanan Transportasi Melalui Inovasi Teknologi dan Digitalisasi;
- p. Penyampaian Hasil dan Advokasi Kajian Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi Transportasi di Indonesia;
- q. Dialog Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026.

Memorandum of Understanding (MoU) Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kebijakan Transportasi dengan PT Indosat Tbk;
- b. Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Bina Nusantara;
- c. Badan Kebijakan Transportasi dengan PT Jasa Raharja.

Kerja sama Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut

- a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dengan PUSTRAL UGM;
- b. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan PUSTRAL UGM;
- c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan PUSTRAL UGM.

SAMBUTAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia - NYA, sehingga Buku Laporan Tahunan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025 telah selesai disusun. Buku Laporan Tahunan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025 berisikan gambaran Sumber Daya Manusia, Program Kerja, Pelaksanaan Kegiatan, Capaian Kinerja serta Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diuraikan berdasarkan unit organisasi di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Informasi-informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Transportasi pada Tahun 2025. Hal ini sebagai upaya mewujudkan kebutuhan informasi bagi masyarakat maupun khalayak yang berkepentingan di bidang transportasi.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Hidayah - NYA kepada kita semua dalam melaksanakan tugas kita masing-masing di masa mendatang.

KEPALA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Irjen Pol. Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PROFIL PIMPINAN	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
SAMBUTAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PROFIL BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Visi dan Misi	1
C. Organisasi dan Tata Kelola	2
D. Profil Sumber Daya Manusia (SDM)	3
E. Sejarah.....	5
BAB II KILAS KINERJA 2024.....	7
A. Arah Kebijakan dan Strategi	7
B. Ringkasan Laporan Keuangan	14
C. Penghargaan.....	15
BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	17
A. Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	17
B. Pengadaan CASN (CPNS, Pola Pembibitan dan PPPK Tahun 2025)	22
BAB IV KEGIATAN STRATEGIS.....	24
A. Badan Kebijakan Transportasi menerima kunjungan Bupati Kabupaten Ketapang beserta Kadishub Ketapang	24
B. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi Bupati Merauke	25
C. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	26
D. Workshop Perpustakaan Khusus dengan tema “Strategi Penulisan Prompt untuk Layanan Perpustakaan”	27
E. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi dari Bupati Pesisir Selatan	29
F. <i>Workshop Awareness</i> Akreditasi Perpustakaan Khusus dan Perguruan Tinggi	30
G. Penandatanganan Keputusan Bersama Badan Kebijakan Transportasi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	

(BPSDMP) terkait tentang pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Isu Strategis dan Analisis Kebijakan Sektor Transportasi	32
H. Agenda Mapping Isu Strategis Sektor Transportasi 2025 dengan tema “Penguatan Sistem Perencanaan, Pembiayaan dan Investasi, Serta Kelembagaan Menuju Transportasi Indonesia Emas”	33
I. Konsultasi Publik Reviu Naskah Akademik dan RUU Sistranas	35
J. Webinar Kebijakan Ekosistem Pengoperasian Seaplane sebagai Alternatif Moda untuk Daerah Laut dan Sungai di Indonesia	36
K. Advokasi Analisis Kebijakan Transportasi	37
L. Transport Dialogue dan #TransporTalk: ALOHA	38
M. Agenda Mapping dengan tema “Konektivitas Sebagai Penggerak Utama Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Logistik”	39
N. Agenda Mapping dengan tema “Kebijakan Angkutan Umum yang Inklusif untuk Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan dan Berkeadilan”	40
O. Agenda Mapping dengan tema Penguatan Resiliensi, Keselamatan dan Keamanan Transportasi Melalui Inovasi Teknologi dan Digitalisasi	41
P. Penyampaian Hasil dan Advokasi Kajian Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi Transportasi di Indonesia	42
Q. Dialog Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026	44
BAB V KETERLIBATAN STAKEHOLDER	46
A. Kerjasama Bilateral/ Regional/ Internasional/ Multilateral	46
BAB VI PENUTUP	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi	2
Gambar 1. 2 Persentase Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.....	3
Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Analisis Kebijakan	4
Gambar 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	4
Gambar 1. 6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Gambar 1. 7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	5
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi	2
Gambar 1. 2 Persentase Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.....	3
Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Analisis Kebijakan	4
Gambar 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	4
Gambar 1. 6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Gambar 1. 7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	5
Gambar 2. 1 Target Rekomendasi Kebijakan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025	13
Gambar 2. 2 Grafik Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	14
Gambar 2. 3 Dokumentasi Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2025	15
Gambar 2. 4 Indikator Pelaksanaan Anggaran Badan Kebijakan Transportasi	16
Gambar 3. 1 Website CASN Kementerian Perhubungan	22
Gambar 4. 1 Dokumentasi Kegiatan Penerimaan Kunjungan	24
Gambar 4. 2 Dokumentasi Kegiatan Audiensi.....	25
Gambar 4. 3 Dokumentasi Kegiatan Audiensi dengan BKKBN	26
Gambar 4. 4 Dokumentasi Kegiatan Workshop Perpustakaan.....	27
Gambar 4. 5 Dokumentasi Kegiatan Audiensi.....	29
Gambar 4. 6 Dokumentasi Workshop Awareness Akreditasi Perpustakaan.....	30
Gambar 4. 7 Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Keputusan Bersama	32
Gambar 4. 8 Dokumentasi Kegiatan Agenda Mapping Isu Strategis Sektor Transportasi 2025.....	33
Gambar 4. 9 Konsultasi Publik Revisi Naskah Akademik dan RUU Sistranas	35
Gambar 4. 10 Dokumentasi Kegiatan Webinar	36
Gambar 4. 11 Dokumentasi Kegiatan Advokasi Analisis Kebijakan Transportasi....	37
Gambar 4. 12 Dokumentasi Kegiatan Transport Dialogue dan #TransportTalk: ALOHA	38
Gambar 4. 13 Dokumentasi Kegiatan Agenda Mapping.....	39
Gambar 4. 14 Dokumentasi Kegiatan Agenda Mapping.....	40
Gambar 4. 15 Dokumentasi Kegiatan Agenda Mapping.....	41
Gambar 4. 16 Dokumentasi Kegiatan Penyampaian Hasil dan Advokasi Kajian	42
Gambar 4. 17 Dokumentasi Kegiatan Dialog Kinerja Badan Kebijakan Transportasi	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.....	3
Tabel 2. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi	8
Tabel 2. 2 Rekomendasi Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025	13
Tabel 5. 1 Memorandum of Understanding (MoU)	46
Tabel 5. 2 Perjanjian Kerja Sama (PKS)	46

BAB I PROFIL BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 Tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Nomor 04 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi. Dalam melaksanakan tugas, Badan Kebijakan Transportasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis serta penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
3. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportasi;
4. Pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;
6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
7. Pelaksanaan administrasi Badan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. Visi dan Misi

Visi Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan *cascading*/ penurunan visi Kementerian Perhubungan 2025-2029, maka ditetapkan Visi Badan Kebijakan Transportasi 2025-2029 sebagai berikut:

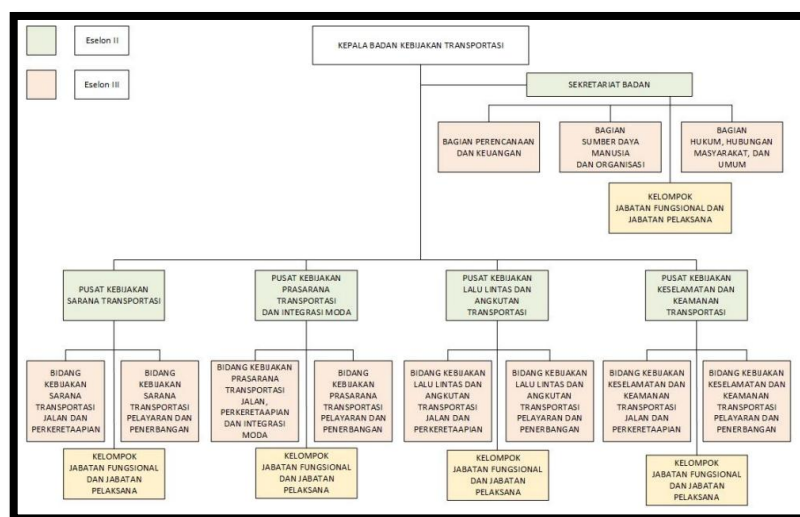
“Rekomendasi Kebijakan yang Cepat, Akurat, dan Manfaat dalam mendukung Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Penyelenggaraan serangkaian proses analisis perumusan kebijakan bidang transportasi yang antisipatif, dan responsif merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan yang kemanfaatannya memiliki nilai strategis untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Badan Kebijakan Transportasi yaitu terselenggaranya Rekomendasi Kebijakan yang Cepat, Akurat, dan Manfaat dalam mendukung Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045 ditetapkan Misi Badan Kebijakan Transportasi, sebagai berikut:

1. Melaksanakan analisis kebijakan untuk mendukung penyediaan transportasi yang inklusif, berkeadilan, aman, dan memenuhi standar pelayanan serta keselamatan nasional;
2. Menyusun rekomendasi kebijakan transportasi yang memperkuat ketahanan, kemandirian, dan pengembangan industri transportasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan transportasi lintas moda, lintas wilayah, dan lintas sektor untuk mendukung sistem transportasi nasional yang terpadu;
4. Mengembangkan pedoman, model kebijakan, serta instrumen rekomendatif berbasis analisis untuk peningkatan keselamatan, keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan transportasi;
5. Meningkatkan kualitas ekosistem data dan analitik kebijakan melalui riset, pemodelan transportasi, pemanfaatan big data, serta sistem informasi pendukung kebijakan;
6. Mendorong kolaborasi strategis dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan mitra internasional dalam proses analisis dan rekomendasi kebijakan;
7. Mengarusutamakan partisipasi publik dalam perumusan rekomendasi kebijakan agar lebih inklusif, responsif, dan akuntabel;
8. Memperkuat kapasitas kelembagaan BKT sebagai pusat analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi melalui pengembangan SDM, tata kelola, proses bisnis, serta manajemen organisasi yang efektif.

C. Organisasi dan Tata Kelola

Badan Kebijakan Transportasi mempunyai 5 (lima) unit satuan kerja yang disusun berdasarkan pendekatan fungsi, yang digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut:



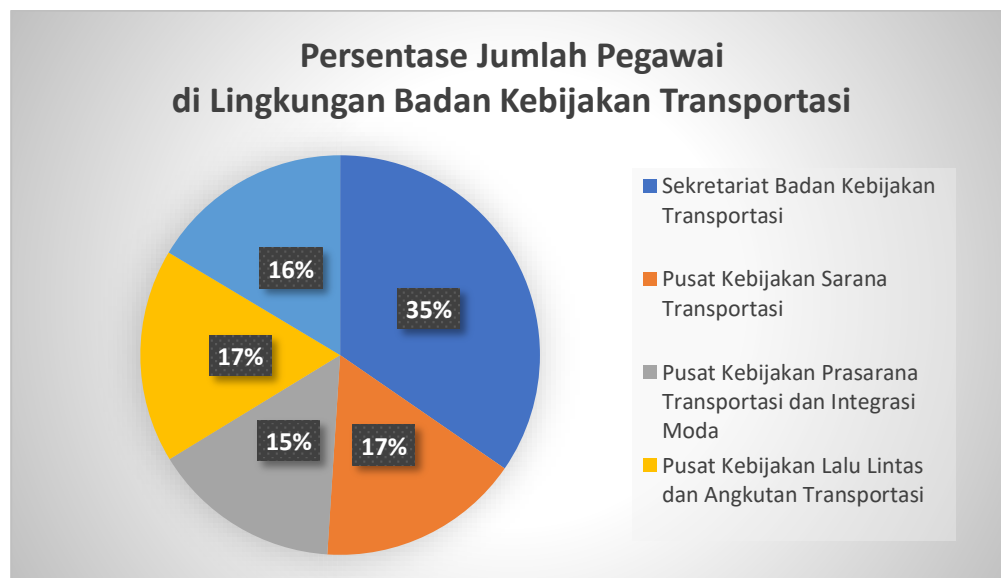
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi

D. Profil Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Kebijakan Transportasi memandang bahwa salah satu modal strategis dalam upaya peningkatan kinerja organisasi adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per 05 Januari 2026 adalah sebanyak 341 pegawai, terdiri dari 261 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 66 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 4 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan 10 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Para Aparatur Sipil Negara tersebut terbagi ke dalam 5 (lima) unit kerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

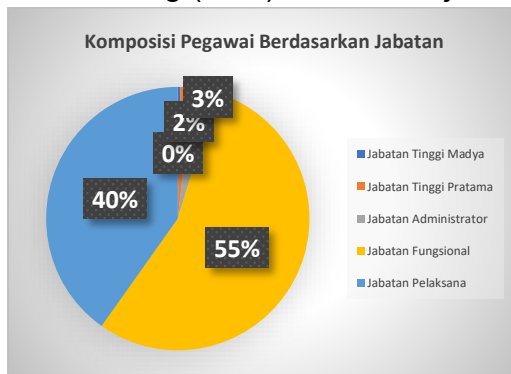
No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	118
2	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	56
3	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	52
4	Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	59
5	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	56
Total		341



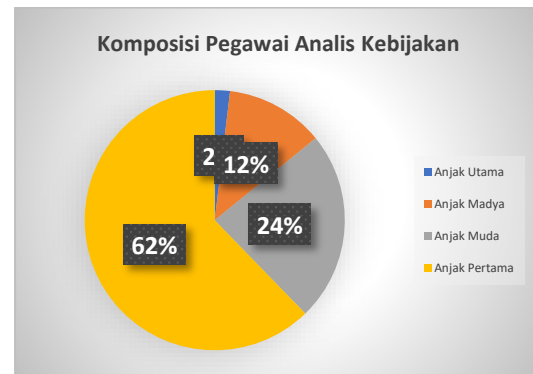
Gambar 1. 2 Persentase Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Badan Kebijakan Transportasi dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya dengan tingkat Eselon I. Pada masing-masing Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama dengan tingkat Eselon II. Total secara keseluruhan jumlah pejabat struktural di Badan

Kebijakan Transportasi adalah sebanyak 16 termasuk Pejabat Tinggi Madya/ Eselon I. Seluruh Jabatan di Badan Kebijakan Transportasi terisi oleh Jabatan Tinggi Madya sebanyak 1 pegawai (0%), Jabatan Tinggi Pratama sebanyak 5 pegawai (2%), Jabatan Administrator sebanyak 10 pegawai (3%), Jabatan Fungsional sebanyak 188 pegawai (55%) dan Jabatan Pelaksana sebanyak 137 pegawai (40%), yang didominasi oleh Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yaitu 106 pegawai. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan menjadi kekuatan utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi, terdapat 2 orang (2%) Analisis Kebijakan Ahli Utama, 13 orang (12%) Analisis Kebijakan Ahli Madya, 25 orang (24%) Analisis Kebijakan Ahli Muda dan 66 orang (62%) Analisis Kebijakan Ahli Pertama.

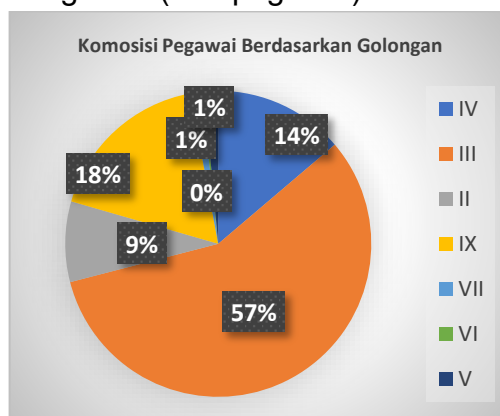


Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

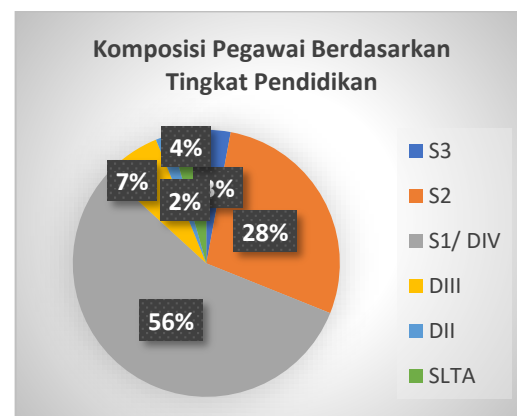


Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Analisis Kebijakan

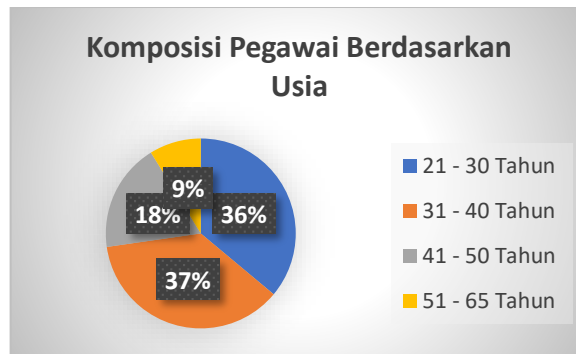
Komposisi pegawai yang memiliki pendidikan terakhir S3 adalah sejumlah 10 orang (3%), S2 sejumlah 96 orang (28%), S1/ DIV sejumlah 190 orang (56%), DIII sejumlah 24 orang (7%), DII sejumlah 6 orang (2%), dan SLTA/SMK mencapai 15 orang (4%). Badan Kebijakan Transportasi secara berkelanjutan mendorong pegawainya untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan melanjutkan pendidikannya, dimana terdapat 9 pegawai yang tengah menjalani tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan golongannya, sebagian besar pegawai merupakan PNS yang menduduki golongan III (195 pegawai).



Gambar 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 1. 6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1. 7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan jenjang usia, terdapat sebanyak 30 pegawai (9%) yang berusia 51 s.d 65 tahun, 63 pegawai (18%) yang berusia 41 s.d 50 tahun, 125 pegawai (37%) yang berusia 31 s.d 40 tahun, dan 123 pegawai (36%) yang berusia 21 s.d 30 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan SDM Badan Kebijakan Transportasi didominasi oleh pegawai generasi Y (Milenial) dan Z. Sedangkan berdasarkan gender, pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan komposisi pegawai berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 176 orang dan komposisi pegawai berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 165 orang.

E. Sejarah

Badan Kebijakan Transportasi merupakan organisasi perubahan dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan. Berdasarkan arahan Menteri Perhubungan di tahun 2020 bahwa dalam rangka menyikapi kebijakan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengintegrasikan seluruh kegiatan penelitian instansi pemerintah, maka Badan Litbang Perhubungan diarahkan untuk bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi.

Perubahan organisasi Badan Kebijakan Transportasi dilaksanakan secara bertahap sejak pengusulan awal di tahun 2020 sampai dengan ditetapkan pada bulan Januari di tahun 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. Selanjutnya struktur organisasi Badan Kebijakan Transportasi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Kemudian kedua peraturan tersebut berganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 Tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Berbeda dengan Badan Litbang Perhubungan dengan lingkup pekerjaan utama adalah penelitian, pelaksanaan pekerjaan Badan Kebijakan Transportasi berfokus pada analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi. Output organisasi Badan Kebijakan Transportasi adalah rekomendasi kebijakan bidang transportasi dalam bentuk naskah kebijakan dengan pengampu kinerja utama organisasi, yaitu pejabat fungsional analis

kebijakan. Pelaksanaan pekerjaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi diawali dengan penyusunan agenda setting yang berangkat dari arahan direktif Menteri Perhubungan, perkembangan dinamika isu transportasi, inisiatif strategis sebagai turunan dari agenda prioritas nasional.

Struktur organisasi Badan Kebijakan Transportasi disusun menggunakan pendekatan fungsi bukan pendekatan moda seperti struktur organisasi sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan isu strategis antar moda dimana fasilitas dan pelayanan transportasi khususnya pada zona transisi haruslah *seamless* dalam satu kesisteman layanan secara fisik maupun teknologi.

Di samping hal tersebut dengan pendekatan fungsi diharapkan dapat memudahkan Badan Kebijakan Transportasi dalam menyusun formulasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang diimplementasikan tepat guna pada 7 (tujuh) objek utama sebagai output kebijakan sektor transportasi, yaitu pelayanan (konektivitas), sarana, prasarana, keselamatan, operasional (lalu lintas dan angkutan), kelembagaan (sdm dan organisasi) dan pembiayaan pembangunan serta tarif.

BAB II KILAS KINERJA 2025

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional di dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 serta arah kebijakan pembangunan sektor transportasi di dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029, disusun arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran program Badan Kebijakan Transportasi tahun 2025-2029.

Dalam tata kelola kebijakan sektor transportasi, Badan Kebijakan Transportasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi mempunyai andil besar dalam menghasilkan kualitas kebijakan bidang transportasi yang baik. Badan Kebijakan Transportasi bertindak sebagai dirigen dalam harmonisasi rumusan kebijakan sektor Transportasi yang akan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, dengan berkolaborasi dengan subsektor/ stakeholder terkait. Dalam pelaksanaan kebijakan BKT turut mendampingi dan BKT kembali menjadi leader dalam proses evaluasi kebijakan untuk terbaikan secara terus menerus.

Sesuai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan yang mana Badan Kebijakan Transportasi memegang peranan penting dan strategis dalam pencapaian sasaran strategis meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan transportasi nasional sehingga fokus kebijakan di arahkan pada:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi strategis yang direkomendasikan Badan Kebijakan Transportasi;
2. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi;
3. Meningkatnya kinerja manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
4. Optimalnya koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif;
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Tabel 2. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi Strategis yang direkomendasikan Badan Kebijakan Transportasi	AK1 Peningkatan relevansi kebijakan transportasi strategis yang direkomendasikan Badan Kebijakan Transportasi	- Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan transportasi melalui rekomendasi strategis dan berdampak nasional dengan mengacu pada cluster isu strategis transportasi yang telah disusun yaitu: 1. Prioritas Nasional: Efisiensi dan Konektivitas Logistik; 2. Prioritas Nasional: Angkutan Umum Massal dan Transportasi Perkotaan; 3. Prioritas Nasional: Transportasi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang dikembangkan; 4. Prioritas Nasional: Transportasi di Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan (3TP) yang dikembangkan; 5. Prioritas Nasional: Transportasi Berkelanjutan; 6. Teknologi dan Digitalisasi Transportasi; 7. Pengembangan Sistem Perencanaan Transportasi Nasional; 8. Resiliensi Transportasi Nasional; 9. SDM, Kelembagaan dan Kebijakan Transportasi; 10. Pembiayaan, Pendanaan dan Investasi Transportasi; 11. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi; 12. Transportasi Inklusif dan Berkeadilan; 13. Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah. - Meningkatkan peran Badan Kebijakan Transportasi dalam meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat evidence based, inovatif yang berorientasi keluar/stakeholders, ke depan (outward looking dan forward looking), dan mendukung transformasi teknologi serta peningkatan kinerja penyelenggaraan sektor transportasi nasional; - Penyusunan/ revisi regulasi dan NSPK terkait dengan dukungan terhadap peningkatan konektivitas, aksesibilitas, integrasi, kinerja pelayanan serta keselamatan dan keamanan transportasi.
	AK2 Peningkatan efektivitas	Meningkatkan koordinasi Badan Kebijakan Transportasi secara lintas sektoral dan lintas administrasi dalam implementasi kebijakan strategis di bidang transportasi;

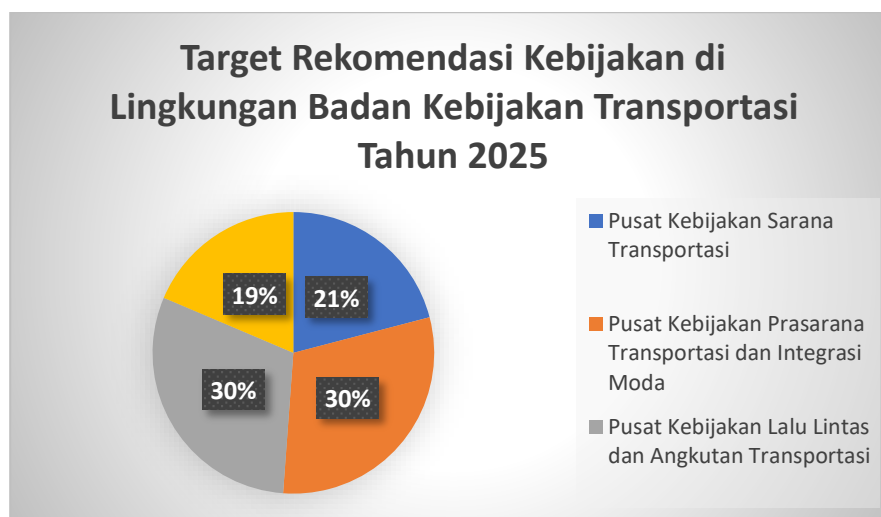
Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	tindakan lanjut kebijakan transportasi strategis yang direkomendasikan Badan Kebijakan Transportasi	• Meningkatkan koordinasi Badan Kebijakan Transportasi antar pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan strategis di bidang transportasi; • Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas dari implementasi kebijakan bidang transportasi.
SP2 Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Transportasi	AK3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan transportasi	• Melakukan koordinasi perencanaan strategis, agenda setting, dan identifikasi isu prioritas dalam rangka perumusan kebijakan transportasi; • Memfasilitasi forum koordinasi lintas sektor untuk penyelarasan perencanaan kebijakan; • Melakukan konsultasi publik dan FGD untuk memastikan rencana kebijakan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan; • Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rencana rekomendasi kebijakan dengan arahan pimpinan dan rencana strategis nasional.
	AK4 Peningkatan kinerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi	• Melaksanakan pengendalian mutu rekomendasi kebijakan (quality assurance) terhadap rekomendasi yang akan diterbitkan; • Memastikan rekomendasi kebijakan disusun melalui metodologi analitis yang baku (evidence-based policy); • Menyediakan asistensi teknis untuk penyusunan rekomendasi kebijakan yang terkoordinasi lintas sektor;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	kebijakan (termasuk pengendalian mutu analisis kebijakan)	Menyusun resume dan dokumen rekomendasi kebijakan sebagai output perencanaan kebijakan yang berkualitas yang disimpan dalam sistem informasi.
	AK5 Peningkatan kinerja pelaksanaan advokasi hasil rekomendasi kebijakan transportasi	- Meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialisasi dan advokasi rekomendasi kebijakan kepada stakeholder terkait; - Melakukan pendampingan advokasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder terkait; - Memfasilitasi koordinasi advokasi lintas sektor untuk meningkatkan kemanfaatan rekomendasi kebijakan; - Menyusun laporan pemantauan pelaksanaan advokasi sebagai dasar peningkatan pemanfaatan rekomendasi kebijakan.
	AK6 Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi terhadap implementasi kebijakan	- Melaksanakan evaluasi kemanfaatan rekomendasi kebijakan secara berkala; - Menyusun laporan evaluasi dan review rekomendasi untuk memastikan rekomendasi relevan dan bermanfaat; - Menyediakan rekomendasi perbaikan berbasis hasil evaluasi.
	AK7 Peningkatan penyediaan informasi kebijakan (manajemen pengetahuan)	- Menyusun dan memperbarui basis data rekomendasi kebijakan sebagai aset intelektual lembaga.; - Menyediakan sistem informasi kebijakan yang mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan; - Melakukan dokumentasi pengetahuan dari proses penyusunan hingga evaluasi kebijakan; - Melaksanakan kegiatan knowledge sharing secara berkala (forum belajar, webinar internal, policy sharing session) untuk mendistribusikan pembelajaran dan best practices lintas unit kerja.

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Badan Kebijakan Transportasi	AK8 Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	• Meningkatkan integrasi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mendukung pencapaian target Indeks Perencanaan dan Penganggaran; • Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan BMN sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good governance; • Memperkuat penerapan manajemen risiko pada proses perencanaan dan keuangan untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan; • Meningkatkan kapasitas pegawai dalam perencanaan kinerja, penganggaran, pengadaan, dan pelaporan keuangan.
	AK9 Peningkatan efektivitas tata kelola SDM dan organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	• Meningkatkan perencanaan kebutuhan dan pengembangan kompetensi SDM berbasis workforce planning; • Memperkuat sistem manajemen SDM, termasuk rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan karier; • Mendorong penerapan Well-Being Organization, seperti lingkungan kerja sehat, budaya kerja positif, dan work-life balance; • Mengoptimalkan pengelolaan data informasi, perpustakaan, dan knowledge center untuk mendukung pelayanan internal; • Menjamin kualitas tata kelola organisasi melalui penyempurnaan proses bisnis dan struktur organisasi.
	AK10 Peningkatan kualitas layanan hukum dan kehumasan di lingkungan	• Meningkatkan kualitas layanan pendampingan pada penyusunan draft regulasi hukum, harmonisasi regulasi, dan kepatuhan regulasi untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi organisasi; • Memperkuat pengelolaan komunikasi publik, termasuk penyampaian informasi kebijakan yang akurat, responsif, dan mudah dipahami; • Mengoptimalkan peran kehumasan dalam membangun citra positif, manajemen isu, serta peningkatan engagement dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal;

Sasaran Program (SP)	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	Badan Kebijakan Transportasi	• Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan umum, termasuk tata usaha, protokoler, dokumentasi, serta layanan dukungan operasional harian; • Memperkuat fasilitasi kerja sama, baik internal maupun eksternal, untuk mendukung koordinasi kebijakan, pertukaran informasi, dan sinergi kelembagaan

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi Badan Kebijakan Transportasi yaitu terselenggaranya Rekomendasi Kebijakan yang Cepat, Akurat, dan Manfaat dalam mendukung Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Program dan Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2025 memiliki target sebanyak 43 (empat puluh tiga) Rekomendasi Kebijakan dan terealisasi sebanyak 36 Rekomendasi Kebijakan ditunjukkan secara persentase sebagaimana diagram berikut:



Gambar 2. 1 Target Rekomendasi Kebijakan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025

Adapun rincian Jumlah Rekomendasi Kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Rekomendasi Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025

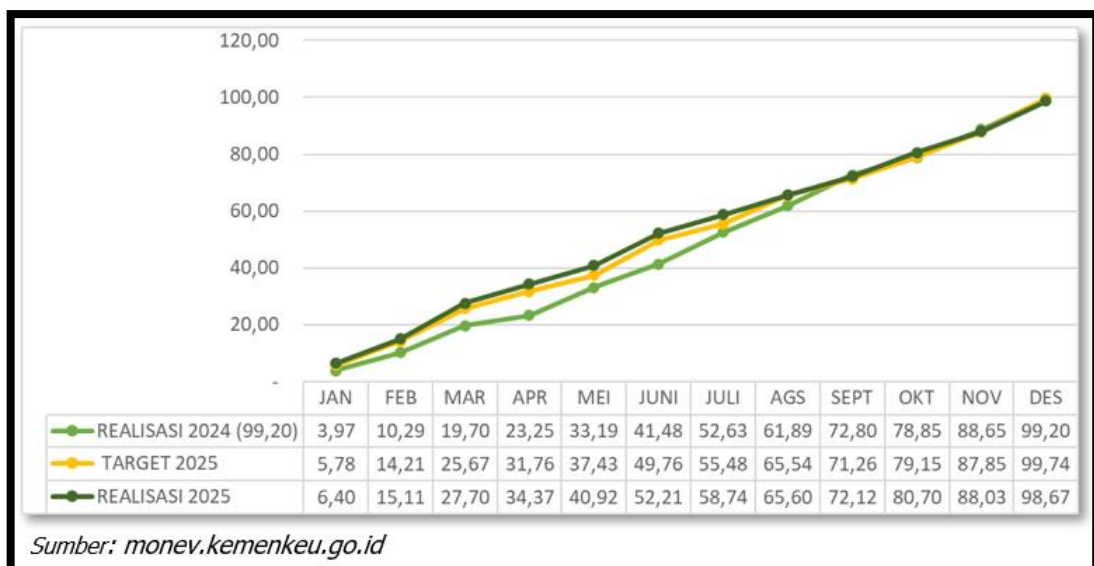
No.	Satuan Kerja	Target Rekomendasi	Realisasi Rekomendasi
1	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	9	9
2	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	13	10
3	Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	13	10
4	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	8	7
Total		43	36

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) yang dimiliki oleh Badan Kebijakan Transportasi. Secara umum, capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025 telah mencapai target. Mengacu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), telah dilakukan evaluasi pencapaian target dan diperoleh rata – rata capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi sebesar 108,927%. Realisasi IKP 1 Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan yaitu sebesar 87,954%, sehingga bila dibandingkan dengan target PK sebesar 85% maka diperoleh capaian kinerja sebesar 103,476%. Realisasi IKP 2 Indeks

Koordinasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi yaitu sebesar 89,221% dengan Target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 80% yang berarti bahwa realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan atau memiliki capaian kinerja sebesar 111,527%. Realisasi IKP 3 Indeks Tata Kelola Badan Kebijakan Transportasi yaitu sebesar 92,777% dengan Target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 83% yang berarti bahwa realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan atau memiliki capaian kinerja sebesar 111,779%.

B. Ringkasan Laporan Keuangan

Pagu anggaran awal Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 116.772.728.000,00 yang selanjutnya pada akhir tahun 2025 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.125.391.269.000,00 dengan pagu efektif sebesar Rp. 91.636.777.000,00. Realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi tahun 2025 sebesar Rp 90.370.825.415,00 sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 72,071%. Jika dibandingkan dengan pagu efektif sebesar diperoleh realisasi sebesar 98,619%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian realisasi anggaran tahun 2025 lebih rendah dari pada realiasi tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 2 Grafik Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

C. Penghargaan

Beberapa capaian keberhasilan Badan Kebijakan Transportasi dalam rangka menunjang Tugas dan Fungsi Badan Kebijakan Transportasi di Tahun 2025 antara lain:

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Kementerian Perhubungan Tahun 2025

Pada hari Kamis, 11 Desember 2025 bertempat di Ruang Mataram Lantai 1 Gedung Karya, Kementerian Perhubungan (Jl. Medan Merdeka Barat No.8) Badan Kebijakan Transportasi mendapat Kategori Informatif dengan Nilai 90 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2025.



Gambar 2. 3 Dokumentasi Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2025

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Transportasi

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga, bersama ini disampaikan bahwa untuk mengukur kualitas kinerja belanja dan untuk mewujudkan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*). Untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/ L perlu diselenggarakan penilaian dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Penilaian IKPA digunakan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi belanja K/ L sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/ L dan Pemberian penghargaan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$;
- d) Kurang apabila nilai IKPA < 70

Berdasarkan Evaluasi Om-SPAN terkait Nilai IKPA posisi per Desember 2025 nilai IKPA Badan Kebijakan Transportasi Akhir Triwulan IV TA 2025 sebesar (98,35) berada dalam kategori Sangat Baik. Dengan rincian 5 satker Sangat Baik yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebesar (100,00), Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi Dan Integrasi Moda sebesar (99,33), Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sebesar (99,04), Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebesar (95,43) dan Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan sebesar (95,27).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	02211	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	Nilai	100.00	90.39	100.00	100.00	100.00	97.89	100.00	98.35	100%	0.00	98.35
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.56	20.00	10.00	10.00	9.79	25.00				
			Nilai Aspek	95.20		99.47				100.00				

Gambar 2. 4 Indikator Pelaksanaan Anggaran Badan Kebijakan Transportasi

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di sektor publik, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik. Melalui jalur beasiswa dan diklat, Badan Kebijakan Transportasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor transportasi. Pengembangan kompetensi SDM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta, bahwa peningkatan kualifikasi talenta dilaksanakan melalui tugas belajar. Pengembangan kompetensi ASN selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sampai dengan bulan Desember 2025, sebanyak 9 (sembilan) pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi telah mengajukan permohonan tugas belajar. Adapun kedudukan pegawai dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kedudukan Pegawai yang Mengajukan Permohonan Tugas Belajar

No	Status	Pembiayaan	Penempatan	Jumlah
1	Diberhentikan dari Jabatannya	Beasiswa	Ditempatkan di Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	2
2	Tidak diberhentikan dari jabatannya	Beasiswa	Unit kerja asal	1
3	Diberhentikan dari Jabatannya	Mandiri	-	-
4	Tidak diberhentikan dari jabatannya	Mandiri	Unit kerja asal	6

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pemberian tugas belajar sampai dengan Semester II Tahun 2025, tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) pegawai Badan Kebijakan Transportasi sedang melaksanakan tugas belajar sebagaimana tercantum pada rincian berikut:

Tabel 3. 2 Kedudukan Pegawai yang Melaksanakan Tugas Belajar

No	Status	Pembiayaan	Penempatan	Jumlah
1	Diberhentikan dari Jabatannya	Beasiswa	Ditempatkan di Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	10

No	Status	Pembiayaan	Penempatan	Jumlah
2	Tidak diberhentikan dari jabatannya	Beasiswa	Unit kerja asal	2
3	Diberhentikan dari Jabatannya	Mandiri	-	-
4	Tidak diberhentikan dari jabatannya	Mandiri	Unit kerja asal	18

Tabel 3. 3 Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Status Tugas Belajar Tahun 2025 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan yang Ditempuh	Unit Kerja	Tahun Kuliah	Perkiraan Lulus Kuliah	Keterangan
1	Nadia Milla Hanifah, S.T	Perencana Ahli Pertama	S-2 Magister Teknik Sipil - UI	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	28-08-2023	27-08-2025	TB Beasiswa LPDP dibebastugaskan
2	Rizka Amalia, S.T	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-2 Double Degree/ Magister Teknik Sipil – UI & University of Leeds	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	26-08-2023	28-02-2026	TB Beasiswa BPSPDM dibebastugaskan
3	Mohammad Afwan, S.Si	Statistisi Pertama	S-2 Double Degree/ Magister Teknik Sipil – UI & University of Leeds	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	26-08-2023	28-02-2026	TB Beasiswa BPSPDM dibebastugaskan
4	Edy Arianto, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-2 Double Degree/ Magister Teknik Sipil – UI & University of Leeds	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	26-08-2023	28-02-2026	TB Beasiswa BPSPDM dibebastugaskan
5	Zakiatul Annisa	Pengelola Keuangan	Master of Public Administration	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	08-07-2024	25-05-2026	TB Beasiswa LPDP dibebastugaskan
6	Indah Maryati	Penyusun Data dan Informasi	Master of Public Policy and Management	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	30-09-2024	30-09-2026	TB Beasiswa LPDP dibebastugaskan
7	Friska Miftakhul Ilmi	Statistisi Pertama	Magister Sistem dan Teknik Transportasi	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	12-08-2024	31-07-2026	TB Beasiswa LPDP dibebastugaskan

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan yang Ditempuh	Unit Kerja	Tahun Kuliah	Perkiraan Lulus Kuliah	Keterangan
8	Shaula Rizky Sarlita	Penelaah Teknis Kebijakan	Magister Ekonomika Pembangunan	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	03-02-2025	02-02-2027	TB Beasiswa LPDP dibebastugaskan
9	Wildi Kusumasari	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S3 Ilmu Kesehatan Lingkungan	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	25-08-2025	25-08-2028	TB Beasiswa LPDP dibebastugaskan
10	Devanny Kireina Dewi	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	S2 <i>Organizational Psychology and Business</i>	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	01-09-2025	14-10-2026	TB Beasiswa LPDP dibebastugaskan
11	Muhammad Irham	Penelaah Teknis Kebijakan	S-2 / Magister Terapan Prodi Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi – STIP Jakarta	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	02-01-2024	02-01-2026	TB Beasiswa STIP tidak dibebastugaskan
12	Saktyawan Dwiki Pamungkas	Analisis SDMA Ahli Pertama	S-2 / Magister Terapan Prodi Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi – STIP Jakarta	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	on progress	on progress	TB Beasiswa STIP tidak dibebastugaskan
13	Anggun Pitaloka	Pranata Keuangan APBN Mahir	S-2/ Pascasarjana Manajemen – Sekolah Tinggi Manajemen IMMI	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	06-03-2023	07-03-2025	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
14	Peransi Paskah Sihombing, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1/Ilmu Administrasi Negara – Universitas Terbuka	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	02-10-2023	02-10-2025	TB Biaya Mandiri tidak dibebastugaskan
15	Heru Novelianto	Pengolah Data dan Informasi	S-1 / Manajemen – Universitas Terbuka	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	08-04-2024	08-04-2028	TB Biaya Mandiri Tidak dibebastugaskan
16	Agus Kharir Andriana	Pengadministrasi Perkantoran	S-1 / Teknik Informatika - Universitas Esa Unggul	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	28-02-2024	30-09-2024	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
17	Abduh Khoir	Pengadministrasi Perkantoran	S-1/Ilmu Administrasi Negara - Universitas Terbuka	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	12-06-2023	30-06-2025	TB Biaya Mandiri tidak dibebastugaskan

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan yang Ditempuh	Unit Kerja	Tahun Kuliah	Perkiraan Lulus Kuliah	Keterangan
18	Muhammad Rizal	Penelaah Teknis Kebijakan	S1 Manajemen	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	29-04-2024	29-04-2028	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
19	Bram Hertasning	Kepala Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan	Doktor Administrasi Publik	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	27-02-2023	01-02-26	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
20	Moh Iqbal Wildanul Wahid	Analisis Kebijakan Pertama	S2 Manajemen Transportasi – ITL Trisakti	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	14-10-2024	14-10-2026	TB Beasiswa tidak dibebastugaskan
21	Asti Dian Hapsari	Pranata Humas Penyelia	S1 Ilmu Komunikasi – Universitas Paramadina	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	07-Okt-2024	07-Okt-2026	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
22	Henriko Siahaan	Penelaah Teknis Kebijakan	S2 Manajemen Transportasi – ITL Trisakti	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	28-10-2024	28-10-2028	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
23	Grace Rumondang	Analisis Kebijakan Pertama	S2 Manajemen Transportasi – ITL Trisakti	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	04-11-2024	04-11-2026	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
24	Grace Makella	Analisis Kebijakan Pertama	S1 Manajemen – Universitas Terbuka	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	04-11-2024	04-11-2026	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
25	Anggita Nahda	Pengolah Data dan Informasi	S1 Teknik Sipil	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	01-03-2025	31-12-26	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
26	Dida Wanapati	Pengolah Data dan Informasi	S1 Teknik Sipil	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	01-03-2025	31-12-26	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
27	Nadya Aulia Chalik	Pengolah Data dan Informasi	S1 Teknik Sipil	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	01-03-2025	31-12-26	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
28	Trie Reza Aprilliana	Pengolah Data dan Informasi	S1 Teknik Sipil	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	01-03-2025	31-12-26	TB Mandiri tidak dibebastugaskan
29	Shafira Zahra Puspita Manurung	Pengolah Data dan Informasi	S1 Teknik Sipil	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	24-02-2025	30-12-26	TB Mandiri tidak dibebastugaskan

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan yang Ditempuh	Unit Kerja	Tahun Kuliah	Perkiraan Lulus Kuliah	Keterangan
30	M Rendy Al-Fath Andika Pulun	Pengolah Data dan Informasi	S1 Akuntansi	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	28-02-2025	25-02-27	TB Mandiri tidak dibebastugaskan

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Badan Kebijakan Transportasi, diadakan berbagai pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis dan manajerial. Badan Kebijakan Transportasi telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan, baik pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan sendiri, maupun berpartisipasi dalam pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di luar Badan Kebijakan Transportasi. Pada tahun 2025 ini, Badan Kebijakan Transportasi telah menyelenggarakan sebanyak 1 (satu) kegiatan pelatihan dan berpartisipasi aktif dalam 5 (lima) pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh eksternal Badan Kebijakan Transportasi seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 4 Pelatihan di Internal Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025

No	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	Pelatihan <i>Coaching</i> dan Mentoring dengan metode pembelajaran tatap muka bertempat di Ruang Auditorium, Kantor Badan Kebijakan Transportasi	Batch 1 – 23 s.d 24 September 2025 Batch 2 – 25 s.d 26 September 2025	Batch 1 – 32 Peserta Batch 2 - 32 Peserta

Tabel 3. 5 Pelatihan di Luar Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025

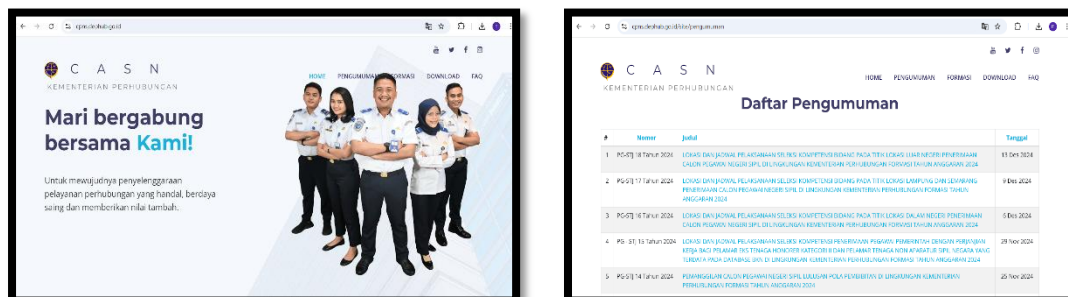
No	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dengan metode pembelajaran distance learning (pembelajaran virtual)	06 Oktober s.d 05 Desember 2025 (terbagi menjadi 5 gelombang)	21 Peserta
2	Pelatihan Pengantar Intelijen Dasar di lingkungan Kementerian Perhubungan	10 s.d 15 November 2025	2 Peserta
3	Pelatihan Petugas K3 Perkantoran Sertifikasi BNSP di	17 s.d.	1 Peserta

No	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
	lingkungan Kementerian Perhubungan secara tatap muka	19 November 2025	
4	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dengan metode pembelajaran secara <i>blended learning</i> yaitu perpaduan antara pembelajaran jarak jauh (<i>distance learning</i>) dan pembelajaran tatap muka (klasikal yang di online-kan)	21 Juli s.d 24 November 2025 (terbagi menjadi 3 gelombang)	10 Peserta
5	<i>Transport Expo Asia (TXA) 2025</i> dan <i>Road Safety Congress 2025</i>	11 s.d. 13 November 2025	1 Peserta

Melalui jalur pendidikan dan pelatihan, Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan berupaya meningkatkan kompetensi SDM secara berkelanjutan. Dengan mengikuti pedoman dari Kementerian PANRB, Badan Kebijakan Transportasi memastikan bahwa pengembangan SDM dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan sektor transportasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi serta mendukung pencapaian tujuan nasional dalam pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

B. Pengadaan CASN (CPNS, Pola Pembibitan dan PPPK Tahun 2025)

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai serta melaksanakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan pegawai non ASN, maka sepanjang Tahun 2025 Kementerian Perhubungan telah melaksanakan rekrutmen/ pengadaan pegawai melalui beberapa jalur, yaitu pengadaan CPNS, pengangkatan CPNS Jalur Lulusan Pola Pembibitan serta pengadaan PPPK.



Gambar 3. 1 Website CASN Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Surat Pengumuman Sekretaris Jenderal tanggal 19 Agustus 2024 Nomor PG 11 Tahun 2024 tentang Pengadaan CPNS di Lingkungan

Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2024 dapat diketahui bahwa Kementerian Perhubungan membuka lowongan sebanyak 1.391 formasi CPNS yang terdiri dari 1.266 formasi umum, 49 formasi khusus lulusan terbaik/ cumlaude, 5 formasi khusus putra/putri Papua, 43 formasi khusus putra/ putri Kalimantan dan 28 formasi khusus disabilitas. Kemudian pengadaan pegawai melalui pengangkatan CPNS Jalur Lulusan Pola Pembibitan di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024 ini sebanyak 2.505 formasi. Sedangkan pada pengadaan PPPK Tahun 2024 dalam rangka pengelolaan Pegawai Non ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berdasarkan Surat Pengumuman Sekretaris Jenderal tanggal 30 September 2024 Nomor PG-SKJ 28 Tahun 2024 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2024 dapat diketahui bahwa telah dibuka 16.345 formasi PPPK yang dikhususkan bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PG-SKJ 15 Tahun 2025 tanggal 15 September 2025 tentang Peserta yang Mengisi Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa telah dibuka 3.476 formasi PPPK paruh waktu yang dikhususkan bagi Pegawai Non ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan yang belum terakomodasi untuk diangkat kedalam ASN namun telah terdata dalam pendataan Non ASN di Sistem Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan data pengadaan pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2025 tersebut, Badan Kebijakan Transportasi mendapat 13 formasi CPNS yang terdiri dari 9 formasi umum, 2 formasi khusus lulusan terbaik/ cumlaude, 1 formasi khusus putra/ putri Kalimantan dan 1 formasi khusus disabilitas. Kemudian 6 formasi CPNS Jalur Lulusan Pola Pembibitan dan 46 formasi PPPK.

Sampai dengan akhir Desember 2025, proses seleksi pengadaan CPNS dan PPPK telah selesai dilaksanakan, dengan rincian Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan pegawai formasi CPNS berjumlah 10 pegawai yang terdiri dari 9, formasi umum dan 1 formasi khusus disabilitas dengan TMT pada 1 Mei 2025. Kemudian Badan Kebijakan transportasi juga mendapatkan formasi PPPK yang terdiri dari 39 PPPK Penuh Waktu dengan TMT pada 1 Juni 2025 dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 4 PPPK Paruh Waktu dengan TMT pada 1 Oktober 2025. Berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, bahwa Penempatan CPNS Pola Pembibitan Tahun 2025 difokuskan untuk mengisi kebutuhan formasi di luar pulau Jawa dan Bali, sehingga kebutuhan formasi CPNS Pola Pembibitan Tahun 2025 di Badan Kebijakan Transportasi sebanyak 6 formasi, diisi dengan mekanisme Talent Pool yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dan direncanakan masuk terhitung mulai tanggal 01 Februari 2026.

BAB IV KEGIATAN STRATEGIS

A. Badan Kebijakan Transportasi menerima kunjungan Bupati Kabupaten Ketapang beserta Kadishub Ketapang

Senin, 28 April 2025



Gambar 4. 1 Dokumentasi Kegiatan Penerimaan Kunjungan

Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Robby Kurniawan menerima kunjungan Bupati Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo beserta Kadishub Ketapang, Akia di Kantor Badan Kebijakan Transportasi. Pada kesempatan ini, Bupati Ketapang mengharapkan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan untuk dapat merealisasikan pengembangan infrastruktur transportasi di Kabupaten Ketapang demi kemajuan transportasi di wilayah tersebut. Dalam Pertemuan tersebut, Bupati Kabupaten Ketapang mengusulkan beberapa hal mengenai transportasi, seperti penambahan maskapai penerbangan dan rute penerbangan di Bandara Rahadi Oesman Ketapang, mengingat Kabupaten Ketapang merupakan wilayah strategis di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan industri. Hal ini pun dipandang perlu guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ketapang. Selain itu, Bupati Kabupaten Ketapang juga mengusulkan penataan kawasan bandara seperti penambahan rute penerbangan serta pembangunan ruang VIP untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa bandara.

Menanggapi hal tersebut, Robby Kurniawan yang didampingi oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengatakan perlu upaya akselerasi kebutuhan dukungan pembangunan dimaksud, serta menekankan perlunya dukungan dan koordinasi dari Pemerintah Daerah demi terwujudnya kemajuan transportasi di daerah tersebut.

B. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi Bupati Merauke

Selasa, 29 April 2025



Gambar 4. 2 Dokumentasi Kegiatan Audiensi

Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Robby Kurniawan menerima audiensi Bupati Merauke, Yoseph B. Gebze beserta jajaran di Kantor Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Audiensi ini membahas agenda strategis terkait percepatan pembangunan kabupaten Merauke sebagai daerah penopang program Food Estate di wilayah timur Indonesia melalui pengembangan infrastruktur transportasi. Kepala Badan Kebijakan Transportasi mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan memiliki tiga Key Perform Indicator, yaitu meningkatkan konektivitas nasional, meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, dan meningkatkan keselamatan transportasi.

Pada kesempatan ini Bupati Merauke juga mengusulkan beberapa program percepatan transportasi yang dibutuhkan di Kabupaten Merauke diantaranya adalah pembangunan Pelabuhan Matandi, Pelabuhan Sambudong distrik Padua, Pelabuhan Bian 1, Pelabuhan Wanam, dan Pembangunan Fasilitas Bandara Mopah. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan siap bersinergi dan berkolaborasi serta memberikan dukungan penuh agar seluruh rencana pengembangan dapat segera direalisasikan, demi mendorong kemajuan infrastruktur transportasi dan mempercepat pembangunan wilayah Kabupaten Merauke. Turut hadir dalam audiensi ini Ketua DPRD Kab. Merauke, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Merauke, Staff Khusus Bupati Merauke, serta perwakilan direktorat terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan.

C. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Jumat, 09 Mei 2025



Gambar 4. 3 Dokumentasi Kegiatan Audiensi dengan BKKBN

Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Robby Kurniawan menerima audiensi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dihadiri oleh Deputy KSPK, Nopian Andusti beserta jajaran di Kantor Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Audiensi ini selain sebagai wujud sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga juga secara khusus membahas mengenai dukungan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Sidaya (Lanjut Usia Berdaya). Dalam sambutannya, Kepala Badan Kebijakan Transportasi menjelaskan bahwa lembaganya kini merupakan transformasi dari Badan Litbang, dengan peran sentral dalam penguatan kebijakan transportasi di semua moda: darat, laut, udara, dan kereta api, serta unsur penunjang lainnya. Ia menegaskan komitmen Kemenhub untuk menghadirkan transportasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, termasuk bagi kelompok lansia. Beberapa inisiatif yang disoroti meliputi subsidi tarif, fasilitas khusus bagi lansia, hingga peningkatan aksesibilitas di berbagai moda transportasi.

Sementara itu, Deputy KSPK BKKBN, Nopian Andusti, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Baketrans dan menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mendampingi kelompok lansia. Ia menyebut bahwa Indonesia saat ini telah memasuki era masyarakat menua (ageing population), dengan persentase lansia mencapai lebih dari 12% dari total populasi. Ia juga memperkenalkan program Lanjut Usia Berdaya (SIDAYA) yang diinisiasi BKKBN sebagai strategi untuk menciptakan lansia yang sehat, merasa aman, dan tetap aktif di masyarakat. Program ini mencakup berbagai layanan, seperti Sekolah Lansia, pemeriksaan kesehatan berkala, pendampingan jangka panjang (PJP), dan pelatihan kewirausahaan bagi lansia. Program SIDAYA, dengan konsep multisektoral, mendorong integrasi antara layanan transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi untuk lansia. Salah satu rencana

konkret adalah menjajaki pilot project layanan transportasi inklusif berbasis SIDAYA di beberapa wilayah prioritas.

Audiensi ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan komunikasi dan menyusun langkah-langkah teknis bersama. Baketrans sendiri akan melakukan peninjauan kebijakan eksisting serta mengusulkan skema baru yang lebih ramah lansia, sementara BKKBN siap mendukung melalui data, pendekatan keluarga, dan model pemberdayaan lansia berbasis komunitas. Melalui kolaborasi ini, diharapkan lansia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian aktif dari pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

D. Workshop Perpustakaan Khusus dengan tema “Strategi Penulisan Prompt untuk Layanan Perpustakaan”

Rabu, 25 Juni 2025



Gambar 4. 4 Dokumentasi Kegiatan Workshop Perpustakaan

Dalam rangka mendukung transformasi digital dan meningkatkan kualitas layanan informasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Workshop Perpustakaan Khusus dengan tema “Strategi Penulisan Prompt untuk Layanan Perpustakaan”. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Badan Kebijakan Transportasi. Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Suranto, menyampaikan bahwa penguasaan teknologi digital oleh pustakawan menjadi hal esensial untuk menjaga relevansi dan kualitas layanan perpustakaan di tengah perubahan zaman. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Suryanto mengatakan bahwa saat ini terdapat 22 perpustakaan khusus yang terakreditasi A. Oleh karena itu, dibutuhkan pengoptimalan layanan kepastakaan berbasis AI.

Tujuan yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan ini untuk membekali pustakawan dengan keterampilan dasar dalam menyusun prompt atau perintah teks yang digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang efektif guna mendukung layanan

perpustakaan digital. Sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti chatbot, asisten virtual, maupun media sosial sebagai sarana komunikasi yang cerdas, cepat, dan relevan.

Menghadirkan narasumber profesional Riko B. Permatasari selaku Ketua Umum FPK-Indonesia dan Ari Nugraha, S.Hum., M.T.I., Ph.D, Kepala Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Serta dihadiri oleh Perpustakaan Khusus di wilayah DKI Jakarta dan UPT Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Wilayah DKI Jakarta.

Materi yang disampaikan oleh narasumber antara lain adalah konsep dasar dan fungsi penulisan prompt dalam layanan perpustakaan digital, teknik menulis prompt yang efektif, terarah, dan kontekstual, pemahaman audiens dan karakter pemustaka digital, Penerapan prompt dalam media sosial dan chatbot perpustakaan, serta meningkatkan citra dan daya jangkauan layanan melalui strategi prompt yang komunikatif. Kegiatan disusun secara interaktif yang diawali dengan sesi teori dengan penyampaian materi dasar tentang komunikasi efektif. Kemudian latihan praktik yang berisi simulasi presentasi, feedback langsung antara narasumber dan pustakawan. Diskusi kelompok berbagi pengalaman antar pustakawan.

Workshop “Strategi Penulisan Prompt untuk Layanan Perpustakaan” diharapkan dapat mendorong pengelola perpustakaan khusus untuk lebih adaptif dalam menghadapi tantangan digital dan komunikasi publik yang semakin kompleks. Melalui peningkatan kemampuan menulis prompt yang efektif, pustakawan akan lebih siap dalam mengelola interaksi digital yang cerdas, cepat, dan responsif. Sehingga, dapat memperkuat peran perpustakaan dalam menyediakan layanan informasi yang relevan dan berdaya guna. Pengelola perpustakaan khusus diharapkan menjadi lebih percaya diri dan kompeten dalam mengoptimalkan teknologi layanan yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pemanfaatan koleksi, peningkatan citra lembaga, serta keterlibatan aktif pemustaka dari lingkungan lembaga induk maupun mitra kerja.

E. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi dari Bupati Pesisir Selatan

Kamis, 17 Juli 2025



Gambar 4. 5 Dokumentasi Kegiatan Audiensi

Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) menerima audiensi dari Bupati Pesisir Selatan, H. Hendra Joni, beserta jajaran, terkait rencana pembangunan Bandara Perairan (Water Aerodrome) di Kawasan Wisata Mandeh, Sumatera Barat. Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Capt. Novyanto Widadi, mewakili Kepala Badan Kebijakan Transportasi, menyampaikan bahwa pengembangan water aerodrome merupakan bagian dari strategi besar dalam kerangka pembangunan transportasi nasional 2025–2029, khususnya untuk memperkuat konektivitas kawasan pariwisata, perikanan, dan kepulauan. Transportasi udara berbasis perairan (seaplane) menjadi solusi yang menjanjikan dalam menjawab tantangan aksesibilitas di wilayah yang belum terjangkau bandara konvensional.

Beberapa isu strategis turut menjadi perhatian, mulai dari perencanaan tata ruang, dukungan lahan, estimasi biaya dan perizinan, potensi pasar, hingga skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) maupun model investasi swasta. Adapun lokasi utama yang direncanakan adalah Teluk Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan. Area ini memiliki perairan yang tenang dan terlindung, cocok untuk pendaratan dan lepas landas pesawat amfibi seperti DHC-6 Twin Otter dan Cessna Caravan Amphibian. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana skema pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dukungan APBD dan potensi investor swasta.

Dalam hal ini, Baketrans mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan akan menindaklanjuti dengan pendalaman teknis dan sinergi lintas sektor, termasuk dengan KKP dan Perum LPPNPI, agar pembangunan bandara perairan tersebut selaras dengan regulasi dan tatanan kebandarudaraan nasional. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang konstruktif untuk menjajaki tahapan perencanaan dan kolaborasi berikutnya

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders terkait dalam pengembangan konektivitas udara berbasis perairan di wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia.

F. *Workshop Awareness Akreditasi Perpustakaan Khusus dan Perguruan Tinggi*

Jumat, 18 Juli 2025



Gambar 4. 6 Dokumentasi Workshop Awareness
Akreditasi Perpustakaan

Dalam upaya memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi menginisiasi *Workshop Awareness Akreditasi Perpustakaan Khusus dan Perguruan Tinggi*. Kegiatan ini menjadi wujud nyata pembinaan terarah dan berkelanjutan terhadap 28 unit pelayanan perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari 6 perpustakaan khusus dan 22 perpustakaan perguruan tinggi di lingkungan Kemenhub. Pelaksanaan workshop ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2023 tentang Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang menetapkan Badan Kebijakan

Transportasi sebagai pembina penyelenggaraan perpustakaan sekaligus penentu arah kebijakan pengelolaannya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber dari Perpustakaan Nasional RI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta serta diikuti secara daring oleh para pengelola perpustakaan dan pustakawan dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kemenhub. Workshop ini bertujuan agar peserta mampu memahami penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, memahami komponen dan instrumen akreditasi, serta dapat melakukan self-assessment dan menyusun bukti fisik akreditasi.

Saat ini, dari 28 perpustakaan di lingkungan Kemenhub, sebanyak 12 unit perpustakaan telah terakreditasi sebagai berikut:

1. Akreditasi A: Perpustakaan Pusat Kemenhub, STIP Jakarta, PIP Semarang, Poltekbang Jayapura, PKTJ Tegal;
2. Akreditasi B: Poltektrans SDP Palembang, PIP Makassar, Poltekbang Surabaya, Poltekpel Surabaya;
3. Akreditasi C: Poltekpel Barombong, API Banyuwangi, Poltekbang Makassar.

Akreditasi perpustakaan khusus mengacu pada Keputusan Kepala Perpustnas No. 304 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah dan akreditasi perpustakaan perguruan tinggi mengacu pada Keputusan Kepala Perpustnas No. 303 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi interaktif yang membahas sharing pengalaman oleh Perpustakaan yang telah memperoleh akreditasi dengan predikat A, tantangan perpustakaan dalam proses pengusulan akreditasi, dan strategi peningkatan kesiapan unit-unit perpustakaan. Melalui workshop ini, diharapkan seluruh pengelola perpustakaan di lingkungan Kemenhub dapat lebih percaya diri dan terarah dalam membangun perpustakaan yang profesional, unggul, dan sesuai standar nasional. Hal tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendukung Perpustakaan di lingkungan Kemenhub sebagai pusat pengetahuan transportasi nasional.

G. Penandatanganan Keputusan Bersama Badan Kebijakan Transportasi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) terkait tentang pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Isu Strategis dan Analisis Kebijakan Sektor Transportasi

Kamis, 31 Juli 2025



Gambar 4. 7 Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Keputusan Bersama

Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) melakukan penandatanganan Keputusan Bersama terkait tentang pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Isu Strategis dan Analisis Kebijakan Sektor Transportasi pada Kamis (31/7) dalam rangka mitigasi dan penanganan isu strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula BPSDM Perhubungan ini menjadi momentum penting bagi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan kebijakan transportasi yang solutif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Irjen Pol. Capt. Hermanta, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan penguatan kapasitas analisis kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sejumlah isu prioritas telah diidentifikasi sebagai fokus awal kolaborasi, antara lain penanganan ODOL (Over Dimension Over Load), pengaturan transportasi online, perlintasan sebidang kereta api, harga tiket pesawat, dan konsep New Tol Laut. Dalam implementasinya, Baketrans dan BPSDMP mendorong keterlibatan aktif dosen, mahasiswa, dan analis kebijakan untuk terjun langsung dalam riset dan pengumpulan data. Selain itu, terdapat tindak lanjut dari sejumlah kebijakan penting seperti National Transport Policy (NTP), RUU Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), evaluasi penerapan Transport Demand Management (TDM), dan kajian berbagai isu lintas moda. Pemetaan dan rencana aksi juga dilakukan untuk mendukung kebijakan Zero ODOL serta peningkatan daya saing logistik nasional melalui penguatan multimoda angkutan barang.

Adapun langkah-langkah implementasi kolaborasi ini mencakup pembentukan grup koordinasi lintas lembaga, penentuan prioritas kajian, pengumpulan permasalahan dan solusi alternatif, diskusi berkala, hingga knowledge sharing dengan para pakar dan akademisi. Hasil rekomendasi nantinya akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan serta dipublikasikan secara luas. Baketrans dan BPSDMP berharap kolaborasi ini dapat menjadi motor penggerak dalam menghasilkan kebijakan transportasi yang responsif terhadap tantangan zaman, berbasis data, serta mampu meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan konektivitas transportasi nasional.

H. Agenda Mapping Isu Strategis Sektor Transportasi 2025 dengan tema “Penguatan Sistem Perencanaan, Pembiayaan dan Investasi, Serta Kelembagaan Menuju Transportasi Indonesia Emas”

Rabu, 06 Agustus 2025



Gambar 4. 8 Dokumentasi Kegiatan Agenda Mapping Isu Strategis Sektor Transportasi 2025

Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan menggelar Agenda Mapping Isu Strategis Sektor Transportasi 2025 dengan mengusung tema “Penguatan Sistem Perencanaan, Pembiayaan dan Investasi, Serta Kelembagaan Menuju Transportasi Indonesia Emas” pada Rabu (6/8). Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi, dengan tujuan menjaring isu-isu aktual dan strategis di sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memberikan masukan, evaluasi, serta saran konstruktif guna memperkuat arah kebijakan transportasi nasional.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Irjen Pol. Capt. Hermanta, menyampaikan bahwa kegiatan Agenda Mapping merupakan manifestasi Kementerian Perhubungan terhadap penyelenggaraan transportasi baik yang sudah dalam rencana maupun yang sedang dalam pelaksanaan termasuk

mengevaluasi kondisi terkini pada seluruh wilayah Indonesia yang dalam hal ini diwakili undangan dari 10 Provinsi.

Agenda Mapping 2025 ini berfokus pada tiga sub tema, yang pertama adalah pengembangan sistem perencanaan transportasi nasional, kedua strategi pembiayaan, pendanaan, dan investasi transportasi, dan yang ketiga adalah penguatan SDM, lembaga, dan tata kelola kebijakan transportasi. Pembahasan ketiga sub tema tersebut menghadirkan narasumber diantaranya adalah Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Prof. Ir. R. Jachrizal Sumabrata, M.Sc. (Eng). Ph.D.; Akademisi UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S.; dan Pengamat Transportasi, Sukma Radian, S.T., M.T.

Dari hasil pembahasan ketiga sub tema, beberapa isu strategis yang dipetakan antara lain adalah:

1. Pembentukan sistem transportasi nasional terpadu dengan pendekatan perencanaan dan pembangunan sektor transportasi berbasis wilayah, sehingga sektor transportasi dapat berperan menjadi sektor penggerak pembangunan dan pemerataan pembangunan kewilayahan;
2. Peningkatan konektivitas antar pulau, antar kota, dan dari/ke hinterland yang memenuhi standar kinerja dan layanan;
3. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan dalam kerangka peningkatan modal share transportasi publik dan perancangan standar mobilitas perkotaan;
4. Pemantapan integrasi transportasi secara menyeluruh, baik bagi angkutan penumpang maupun angkutan barang, yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah;
5. Penataan jaringan transportasi dua arah antar simpul yang diselaraskan dengan peningkatan kawasan-kawasan industri maupun ekonomi sehingga dapat berdampak optimal baik terhadap kinerja transportasi maupun peningkatan perekonomian nasional;
6. Pengelolaan skema pembiayaan, termasuk kelembagaan, yang tepat untuk setiap usulan-usulan pembangunan infrastruktur maupun penyediaan layanan transportasi;
7. Peningkatan daya saing Indonesia pada kawasan maupun secara global melalui peningkatan kapasitas, kualitas, dan kinerja sektor transportasi.

Hasil pemetaan isu prioritas ini diharapkan akan menjadi dasar dalam merancang kajian strategis jangka pendek, menengah, dan panjang yang relevan dengan kebutuhan daerah.

I. Konsultasi Publik Reviu Naskah Akademik dan RUU Sistranas

Kamis s.d Jumat, 07 s.d 08 Agustus 2025



Gambar 4. 9 Konsultasi Publik Reviu Naskah Akademik dan RUU Sistranas

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) terus mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) sebagai payung hukum untuk membangun sistem transportasi terintegrasi dan berkelanjutan secara nasional. Upaya ini ditandai dengan diselenggarakannya Konsultasi Publik Reviu Naskah Akademik dan RUU Sistranas.

Konsultasi publik ini menjadi forum penting untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil (NGO), dan asosiasi profesi maupun badan usaha, yang mana dalam hal ini Kemenhub ditugaskan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan. Untuk itu, Baketrans pun bekerja sama dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM. RUU Sistranas diharapkan menjadi salah satu solusi atas tantangan transportasi di Indonesia sekaligus mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Sistranas sendiri merupakan sebuah sistem transportasi yang terorganisir, yang terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara, agar didapatkan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Irjen. Pol. Capt. Hermanta menyampaikan bahwa RUU ini dirancang dengan beberapa terobosan penting, antara lain memperkuat integrasi antarmoda melalui simpul terpadu seperti pelabuhan dan stasiun, mengoptimalkan sistem logistik nasional untuk menekan biaya dan meningkatkan daya saing ekonomi, serta memastikan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Selain itu, RUU ini juga mengedepankan ketahanan transportasi nasional terhadap bencana dan mendukung komitmen dekarbonisasi menuju

zero emisi pada 2050, serta memperkuat kelembagaan untuk penanganan transportasi di kawasan aglomerasi.

RUU ini juga telah dirancang agar selaras dengan berbagai regulasi lain seperti UU Cipta Kerja, UU Pemda, UU Energi, UU Penataan Ruang, dan RPJPN 2025–2045. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi bukan sektor yang berdiri sendiri, melainkan pilar penting pembangunan nasional lintas sektor. Dengan Konsultasi Publik ini, diharapkan akan didapatkan pembahasan secara mendalam terkait berbagai aspek penting mulai dari integrasi antarmoda, sistem logistik nasional, transportasi inklusif, hingga komitmen dekarbonisasi serta keterlibatan dengan semua pihak, agar dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan implementatif.

J. Webinar Kebijakan Ekosistem Pengoperasian Seaplane sebagai Alternatif Moda untuk Daerah Laut dan Sungai di Indonesia

Kamis, 04 September 2025



Gambar 4. 10 Dokumentasi Kegiatan Webinar

Kegiatan webinar ini merupakan bagian dari kajian yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada Tahun 2024, dengan kajian yang berjudul Perumusan Kebijakan Potensi Seaplane sebagai Alternatif Moda untuk Daerah Laut dan Sungai di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan kota-kota lain di Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Hermanta, menyampaikan bahwa pengoperasian pesawat amfibi (seaplane) menawarkan solusi potensial untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi yang efisien dan inovatif. Hermanta berharap kegiatan ini menjadi wadah untuk menggali masukan, membangun kolaborasi, dan merumuskan ekosistem pengoperasian seaplane yang terintegrasi demi mendukung konektivitas dan aksesibilitas transportasi di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas Menko Infrastruktur Odo R.M. Manuhutu menyebutkan perlunya harmonisasi regulasi dan koordinasi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia melalui delegasi

kompeten di forum IMO dan ICAO, sekaligus mendorong terbentuknya koordinasi lintas lembaga agar regulasi nasional terkait water aerodrome dan seaplane sejalan dengan standar internasional serta menghindari tumpang tindih aturan. Turut hadir sebagai pembicara kunci Wakil Menteri Perhubungan Suntana, pembicara dari perwakilan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, perwakilan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes.

K. Advokasi Analisis Kebijakan Transportasi

Kamis, 02 Oktober 2025



Gambar 4. 11 Dokumentasi Kegiatan Advokasi Analisis Kebijakan Transportasi

Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda (PTIM) menggelar kegiatan Advokasi Analisis Kebijakan Transportasi. Kegiatan advokasi ini merupakan tahap penting setelah penyusunan rekomendasi kebijakan. Hasil rekomendasi kebijakan yang pertama disampaikan adalah observasi tatanan transportasi kawasan aglomerasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah dilakukan tahun 2024. Kajian kedua yang disampaikan yaitu yaitu Pengembangan Simpul Angkutan Umum yang Terintegrasi Guna Mewujudkan Smart City. Kajian ketiga yang disampaikan yaitu Key Performance Indicator (KPI) fasilitas prasarana integrasi moda guna meningkatkan kualitas layanan transportasi yang terintegrasi bagi penumpang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Umar Aris selaku Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kebijakan Transportasi, Bapak Agus Ahyar selaku Direktur Sarana Prasarana Dasar Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Sigit Irfansyah Direktur Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda, Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda serta pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

L. Transport Dialogue dan #TransporTalk: ALOHA

Selasa s.d Rabu, 07 s.d 08 Oktober 2025



Gambar 4. 12 Dokumentasi Kegiatan Transport Dialogue dan #TransporTalk: ALOHA

Dalam rangka memperkuat kerja sama internasional di bidang transportasi, Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) menggelar dua acara penting, yaitu Transport Dialogue dan #TransporTalk: ALOHA, yang berlangsung pada 7–8 Oktober 2025, di Jakarta. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama antara Indonesia dan Hawaii, memperkuat kerja sama bilateral, dan mendorong pengembangan sistem transportasi yang aman, ramah lingkungan, serta bisa menjangkau seluruh wilayah terutama daerah kepulauan.

Kegiatan pertama yaitu Transport Dialogue mengusung tema “Enhancing Transportation Planning through Bilateral Knowledge Exchange”, yang menjadi wadah berbagi pengalaman dan pengetahuan antara Indonesia dan Hawaii dalam merencanakan sistem transportasi. Diskusinya membahas berbagai strategi perencanaan transportasi jangka menengah dan panjang. Kegiatan ini juga bertepatan dengan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025–2029 dan pelaksanaan Hawaii Statewide Transportation Plan 2045. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Hermanta menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini. Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara untuk memperkaya arah kebijakan transportasi nasional.

Pada hari berikutnya, Baketrans melanjutkan kegiatan dengan #TransporTalk: ALOHA (Adaptive Learning of Transportation from Hawaii) bertema “Connecting Tourism Hubs in Hawaii and Indonesia: The Role of Transport Policy and Planning.” Acara ini merupakan bagian dari program Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Professional Fellowship Reciprocal Exchange Project. Tujuannya untuk memperkuat hubungan antara kebijakan transportasi dan pengembangan pariwisata berkelanjutan, terutama untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kepala Baketrans menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat

dilepaskan dari penyediaan sistem transportasi yang handal, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dua kegiatan ini menunjukkan peran aktif Baketrans bukan hanya sebagai lembaga perumus kebijakan (*policy think tank*), tetapi juga sebagai jembatan kerja sama internasional di bidang transportasi. Baketrans berkomitmen untuk memperkuat kapasitas perencanaan kebijakan transportasi nasional dengan mengadopsi prinsip keberlanjutan, berbagi praktik terbaik internasional, dan terus memperluas diplomasi kebijakan Indonesia di dunia transportasi.

M. Agenda Mapping dengan tema “Konektivitas Sebagai Penggerak Utama Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Logistik”

Kamis, 16 Oktober 2025



Gambar 4. 13 Dokumentasi Kegiatan Agenda Mapping

Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) melalui Pusat Kebijakan Sarana Transportasi (PKST), menggelar Agenda Mapping dengan tema “Konektivitas Sebagai Penggerak Utama Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Logistik”. Kegiatan ini dirancang untuk mengidentifikasi dan memetakan secara mendalam tantangan, peluang, serta kebutuhan nyata terkait peningkatan konektivitas transportasi dari berbagai perspektif pemangku kepentingan, guna memastikan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan relevan dan tepat sasaran.

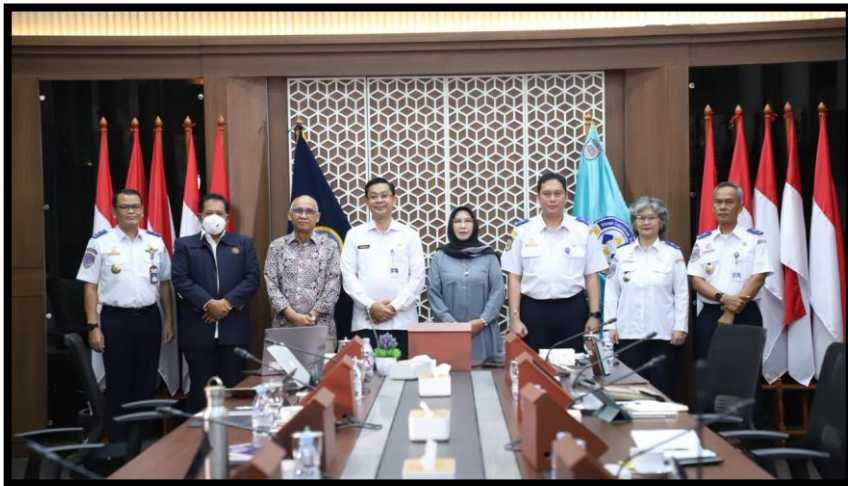
Kepala Baketrans, Irjen Pol. Capt. Hermanta menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh konektivitas transportasi yang merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, integrasi pasar domestik, dan pemerataan pembangunan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menegaskan bahwa konektivitas transportasi menjadi tulang punggung transformasi ekonomi karena mampu menurunkan biaya transaksi, mempercepat perputaran barang dan jasa, serta membuka akses baru bagi daerah-daerah yang selama ini terisolasi. Menurutnya, terdapat 4 (Empat) aspek yang menjadi wujud konkret bagaimana

konektivitas transportasi bekerja sebagai enabler pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Suranto, mengatakan agenda mapping ini berfokus pada 4 (Empat) hal, yaitu peningkatan konektivitas antar wilayah, kebijakan efisiensi dan konektivitas logistik, kebijakan transportasi di kawasan strategis pariwisata nasional, serta kebijakan transportasi di Kawasan 3TP. Output dari agenda mapping ini nantinya akan menjadi landasan bagi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, dalam menyusun agenda riset dan prioritas kebijakan di masa mendatang, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045

N. Agenda Mapping dengan tema "Kebijakan Angkutan Umum yang Inklusif untuk Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan dan Berkeadilan"

Rabu, 22 Oktober 2025



Gambar 4. 14 Dokumentasi Kegiatan Agenda Mapping

Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) melalui Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi (LLAT), menyelenggarakan kegiatan agenda mapping dengan tema "Kebijakan Angkutan Umum yang Inklusif untuk Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan dan Berkeadilan". Tiga isu utama yang menjadi fokus dalam kegiatan ini yakni kebijakan transportasi inklusif dan berkeadilan, kebijakan angkutan umum massal dan perkotaan, serta kebijakan transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan, merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan transportasi sebagai sarana pemerataan, kemajuan, dan keberlanjutan.

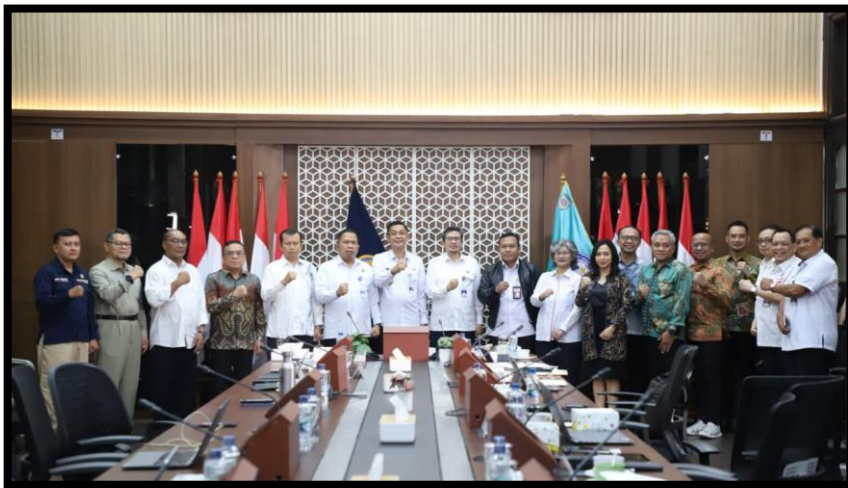
Kepala Baketrans, Irjen Pol. Capt. Hermanta, menegaskan bahwa terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan sistem transportasi yang inklusif. Pemerintah berupaya mewujudkan transportasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui beberapa cara, seperti pengembangan angkutan massal terintegrasi, penerapan Transit Oriented Development (TOD), digitalisasi layanan, dan penggunaan kendaraan listrik agar masyarakat beralih ke transportasi publik yang lebih nyaman, mudah, dan

ramah lingkungan. Ketiga pilar kebijakan ini, inklusif dan berkeadilan, massal dan perkotaan, berkelanjutan dan ramah lingkungan merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan transportasi sebagai sarana pemerataan, kemajuan, dan keberlanjutan.

Dengan diadakannya agenda mapping ini, diharapkan dapat ditemukan isu-isu dan permasalahan publik yang ada di masyarakat sehingga dapat diketahui kebutuhan kebijakan yang perlu segera dirumuskan oleh pemerintah

O. Agenda Mapping dengan tema Penguatan Resiliensi, Keselamatan dan Keamanan Transportasi Melalui Inovasi Teknologi dan Digitalisasi

Kamis, 30 Oktober 2025



Gambar 4. 15 Dokumentasi Kegiatan Agenda Mapping

Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Irjen Pol. Capt. Hermanta menekankan pentingnya pemanfaatan perkembangan teknologi inovasi dan digitalisasi untuk memperkuat aspek keselamatan dan keamanan transportasi. Memasuki era transformasi digital dengan adanya perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, serta Digital Twin membawa tantangan baru, terutama dalam aspek keamanan siber, integritas data, dan interoperabilitas antar sistem.

Hadir sebagai narasumber, Prof. Andri Irfan Guru Besar di bidang Rekayasa Teknologi Transportasi, Universitas Internasional Batam menyebutkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam implementasi teknologi dan digitalisasi transportasi. Strategi penguatan resiliensi berbasis teknologi dapat dilakukan dengan tiga aspek yakni, pemanfaatan GIS dan remote sensing untuk pemetaan risiko dan pemantauan infrastruktur, sistem transportasi cerdas (ITS) untuk manajemen lalu lintas adaptif dan koordinasi respon darurat, dan pendekatan "build back better" dalam pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur. Data valid, terstandarisasi, dan mudah diakses adalah fondasi untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Tanpa data, analisis dan tindakan menjadi normatif dan kurang efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Suhono Harso Head of AISX and SCCIC ITB menyebutkan bahwa data merupakan modal utama, dibutuhkan data real-time perkotaan untuk pengambilan keputusan cepat, termasuk data dari operator (angkutan, penumpang) dan sensing publik. Turut hadir dalam diskusi ini, Dr. Ir. Soerjanto Tjahjono Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Dr. Denny Setiawan Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital serta Dr. Yayat Supriyatna Pemerhati Kebijakan Publik.

P. Penyampaian Hasil dan Advokasi Kajian Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi Transportasi di Indonesia

Selasa, 04 November 2025



Gambar 4. 16 Dokumentasi Kegiatan Penyampaian Hasil dan Advokasi Kajian

Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi (LLAT), menyusun Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi Transportasi di Indonesia. Agar hasil kajian ini dapat dipahami secara komprehensif dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil langkah kebijakan ke depan, Pusat Kebijakan LLAT pun menyelenggarakan kegiatan Penyampaian Hasil dan Advokasi Kajian Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi Transportasi di Indonesia.

Kepala Pusat Kebijakan LLAT, M. Arief Affandi mengatakan bahwa ITS memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan sensor cerdas untuk menciptakan manajemen lalu lintas yang adaptif, efisien, dan terintegrasi. Melalui penerapan ITS, pengawasan lalu lintas dapat dilakukan secara real-time, penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbasis elektronik, dan pelayanan kepada pengguna jalan dapat menjadi lebih cepat dan akurat. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan.

Kemudian sejalan dengan Kepala Pusat Kebijakan LLAT, Vice President ITS Indonesia yaitu Resdiansyah, mengatakan bahwa sistem transportasi cerdas mempunyai tujuan dasar untuk membantu pengguna transportasi mendapatkan informasi, mempermudah transaksi, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana, mengurangi kemacetan, meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Resdiansyah menilai terdapat beberapa target dan sasaran yang harus dicapai dengan keberadaan ITS, seperti membangun budaya tertib berlalulintas dan penggunaan angkutan umum di masyarakat Indonesia, meningkatkan pelayanan transportasi ke masyarakat Indonesia di setiap kota, serta mendukung program peningkatan digital mobility di setiap kota dan kabupaten di Indonesia.

Terdapat 4 (Empat) hal yang menjadi ruang lingkup penyusunan rekomendasi kebijakan, yaitu identifikasi permasalahan yang menghambat implementasi ITS di bidang transportasi jalan Indonesia, inventarisasi peraturan perundangan dan kebijakan terkait, dokumen perencanaan strategis, pengumpulan dan pengolahan data sekunder serta primer yang berkaitan dengan kapasitas dan kondisi aktual transportasi jalan di Indonesia, serta perumusan rekomendasi kebijakan. Dari hasil penyusunan tersebut, didapatkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat arah pengembangan ITS di Indonesia, seperti penyusunan ITS National Road Map yang harus segera dibentuk dengan target yang terukur serta visi yang jelas hingga 10–20 tahun ke depan. Selain itu, Kementerian Perhubungan perlu menetapkan standar nasional terkait interoperabilitas dan komunikasi data agar seluruh sistem yang dibangun di berbagai daerah dapat terintegrasi secara menyeluruh.

Dari sisi kelembagaan, diperlukan reformasi melalui pembentukan Otoritas ITS Nasional sebagai lembaga koordinator tunggal. Upaya ini harus didukung dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat antara kementerian, pemerintah daerah, BUMN, pihak swasta, dan akademisi untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan ITS nasional. Sementara itu, dalam hal pendanaan, dibutuhkan model pembiayaan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan mendorong penerapan skema Public-Private Partnership (PPP) guna menarik investasi dari sektor swasta. Selain itu, perlu dikembangkan model bisnis berbasis data, di mana data lalu lintas yang dikumpulkan dapat dimonetisasi sebagai sumber pendanaan untuk pengembangan ITS lebih lanjut. Dari segi pengembangan SDM, diperlukan program sertifikasi profesional bagi para insinyur dan manajer ITS untuk memastikan kompetensi teknis yang memadai, serta perlu dibentuk Center of Excellence di perguruan tinggi untuk mendorong kegiatan penelitian, pengembangan inovasi, serta menghasilkan talenta-talenta lokal yang mampu mendukung keberlanjutan implementasi ITS di Indonesia.

Q. Dialog Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026

Jakarta – Rabu, 17 Desember 2025



Gambar 4. 17 Dokumentasi Kegiatan Dialog Kinerja Badan Kebijakan Transportasi

Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) terus memperkuat efektivitas organisasi dan kinerja pegawai guna menjawab tantangan kebijakan transportasi yang semakin kompleks. Penguatan ini dilakukan melalui penerapan sistem kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta penguatan koordinasi lintas unit. Mewakili Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kapusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda (PTIM), Capt. Novyanto Widadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, kredibel dan relevan perlu diarahkan pada satu tujuan bersama dengan memastikan bahwa kinerja organisasi yang terukur dan mekanisme kerja berjalan konsisten. Hadir sebagai narasumber, Widi Novianto, Direktur Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan, LAN RI menekankan pentingnya pelibatan pengambil kebijakan sejak awal proses penyusunan kebijakan agar hasil analisis lebih relevan dan berpeluang digunakan.

Penguatan organisasi Baketrans sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional dan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penataan organisasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 140 Tahun 2024, dengan struktur yang lebih ramping, penguatan peran jabatan fungsional, serta mekanisme kerja yang lebih agile dan kolaboratif. Sejalan dengan hal tersebut, Pungky Hendrawijaya, Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Infrastruktur dan Pemerintah Daerah Wilayah II KEMENPANRB menegaskan bahwa penataan organisasi diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih responsif, adaptif, dan tidak berbelit, melalui struktur yang lebih ramping, penguatan jabatan fungsional, serta mekanisme kerja yang kolaboratif dan berbasis kinerja. Ke depan, Baketrans didorong untuk mengembangkan pendekatan *learning organization*, *knowledge management*, dan *evidence-based policy*. Melalui

langkah ini, termasuk pengembangan laboratorium kebijakan dan Forum Komunikasi Kebijakan, Baketrans diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan transportasi nasional secara berkelanjutan.

Kegiatan Dialog Kinerja dengan tema “Penguatan Organisasi dan Mekanisme Kerja Badan Kebijakan Transportasi untuk Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Nasional yang Lebih Efektif” ini diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kerja Baketrans. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memetakan rencana aksi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2026. Melalui kegiatan ini, pegawai diharapkan memahami peran dan tanggung jawab kinerjanya sebagai bagian dari *cascading* target organisasi dan pimpinan.

BAB V KETERLIBATAN STAKEHOLDER

A. Kerjasama Bilateral/ Regional/ Internasional/ Multilateral

Badan Kebijakan Transportasi terus berupaya mendorong inovasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif, adaptif dan menjawab kebutuhan masyarakat salah satunya melalui kolaborasi dengan mitra-mitra strategis baik nasional maupun internasional. Pada tahun 2025, Badan Kebijakan Transportasi telah berkomitmen melalui *Memorandum of Understanding* (MoU)/ nota kesepahaman awal dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Memorandum of Understanding (MoU)

No	Judul	Mitra	Tanggal Penandatanganan	Jangka Waktu
1.	Kerja Sama Penyelenggaraan Data Pergerakan Data di Bidang Transportasi	PT Indosat Tbk	09 Januari 2025	3 Tahun
2.	Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi	Universitas Bina Nusantara	13 Oktober 2025	1 Tahun
3.	Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi	PT Jasa Raharja	18 Desember 2025	5 Tahun

Tabel 5. 2 Perjanjian Kerja Sama (PKS)

No	Judul	Mitra	Tanggal Penandatanganan	Jangka Waktu
1.	Reviu Naskah Akademik RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi – PUSTRAL UGM	09 Juli 2025	Sampai berakhirnya kegiatan
2.	Optimalisasi Fungsi Terminal Logistik untuk Mendukung Logistik	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda – PUSTRAL UGM	30 Oktober 2025	Sampai berakhirnya kegiatan
3.	Swakelola Pengadaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda – PUSTRAL UGM	27 Oktober 2025	Sampai berakhirnya kegiatan

BAB VI PENUTUP

- A. Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kebijakan Transportasi mempunyai 5 (lima) unit kerja Eselon II, yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi dan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Kebijakan Transportasi;
- B. Adapun jumlah SDM Badan Kebijakan Transportasi sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2025 tercatat sebanyak 341 pegawai;
- C. Program dan Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2025 memiliki target sebanyak 43 (empat puluh tiga) Rekomendasi Kebijakan dan terealisasi sebanyak 36 Rekomendasi Kebijakan. Secara umum, capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025 telah mencapai target. Mengacu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), telah dilakukan evaluasi pencapaian target dan diperoleh rata – rata capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi sebesar 108,927%;
- D. Pagu anggaran awal Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 116.772.728.000,00 yang selanjutnya pada akhir tahun 2025 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.125.391.269.000,00 dengan pagu efektif sebesar Rp. 91.636.777.000,00. Realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi tahun 2025 sebesar Rp 90.370.825.415,00 sehingga diperoleh realisasi anggaran sebesar 72,071%. Jika dibandingkan dengan pagu efektif sebesar diperoleh realisasi sebesar 98,619%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian realisasi anggaran tahun 2025 lebih rendah dari pada realiasi tahun 2024. Selama Tahun 2025 Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan 2 penghargaan yaitu Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Transportasi;
- E. Sampai dengan bulan Desember 2025, sebanyak 9 (sembilan) pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi telah mengajukan permohonan tugas belajar. Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pemberian tugas belajar sampai dengan Semester II Tahun 2025, tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) pegawai Badan Kebijakan Transportasi sedang melaksanakan tugas belajar. Badan Kebijakan Transportasi telah menyelenggarakan sebanyak 1 (satu) kegiatan pelatihan dan berpartisipasi aktif dalam 5 (lima) pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh eksternal Badan Kebijakan Transportasi;
- F. Sampai dengan akhir Desember 2025, proses seleksi pengadaan CPNS dan PPPK telah selesai dilaksanakan, dengan rincian Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan pegawai formasi CPNS berjumlah 10 pegawai yang

terdiri dari 9, formasi umum dan 1 formasi khusus disabilitas dengan TMT pada 1 Mei 2025. Kemudian Badan Kebijakan transportasi juga mendapatkan formasi PPPK yang terdiri dari 39 PPPK Penuh Waktu dengan TMT pada 1 Juni 2025 dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 4 PPPK Paruh Waktu dengan TMT pada 1 Oktober 2025. Berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, bahwa Penempatan CPNS Pola Pembibitan Tahun 2025 difokuskan untuk mengisi kebutuhan formasi di luar pulau Jawa dan Bali, sehingga kebutuhan formasi CPNS Pola Pembibitan Tahun 2025 di Badan Kebijakan Transportasi sebanyak 6 formasi, diisi dengan mekanisme Talent Pool yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dan direncanakan masuk terhitung mulai tanggal 01 Februari 2026;

G. Kegiatan Strategis Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kebijakan Transportasi menerima kunjungan Bupati Kabupaten Ketapang beserta Kadishub Ketapang;
- b. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi Bupati Merauke;
- c. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. Workshop Perpustakaan Khusus dengan tema “Strategi Penulisan Prompt untuk Layanan Perpustakaan”;
- e. Badan Kebijakan Transportasi menerima audiensi dari Bupati Pesisir Selatan;
- f. Workshop Awareness Akreditasi Perpustakaan Khusus dan Perguruan Tinggi;
- g. Penandatanganan Keputusan Bersama Badan Kebijakan Transportasi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) terkait tentang pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Isu Strategis dan Analisis Kebijakan Sektor Transportasi;
- h. Agenda Mapping Isu Strategis Sektor Transportasi 2025 dengan tema “Penguatan Sistem Perencanaan, Pembiayaan dan Investasi, Serta Kelembagaan Menuju Transportasi Indonesia Emas”;
- i. Konsultasi Publik Reviu Naskah Akademik dan RUU Sistranas;
- j. Webinar Kebijakan Ekosistem Pengoperasian Seaplane sebagai Alternatif Moda untuk Daerah Laut dan Sungai di Indonesia;
- k. Advokasi Analisis Kebijakan Transportasi;
- l. Transport Dialogue dan #TransporTalk: ALOHA;
- m. Agenda Mapping dengan tema “Konektivitas Sebagai Penggerak Utama Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Logistik”;
- n. Agenda Mapping dengan tema “Kebijakan Angkutan Umum yang Inklusif untuk Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan dan Berkeadilan”;
- o. Agenda Mapping dengan tema Penguatan Resiliensi, Keselamatan dan Keamanan Transportasi Melalui Inovasi Teknologi dan Digitalisasi;

- p. Penyampaian Hasil dan Advokasi Kajian Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi Transportasi di Indonesia;
 - q. Dialog Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2026
- H. *Memorandum of Understanding* (MoU) Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- a. Badan Kebijakan Transportasi dengan PT Indosat Tbk;
 - b. Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Bina Nusantara;
 - c. Badan Kebijakan Transportasi dengan PT Jasa Raharja.
- I. Kerja sama Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut
- a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dengan PUSTRAL UGM;
 - b. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan PUSTRAL UGM;
 - c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan PUSTRAL UGM.